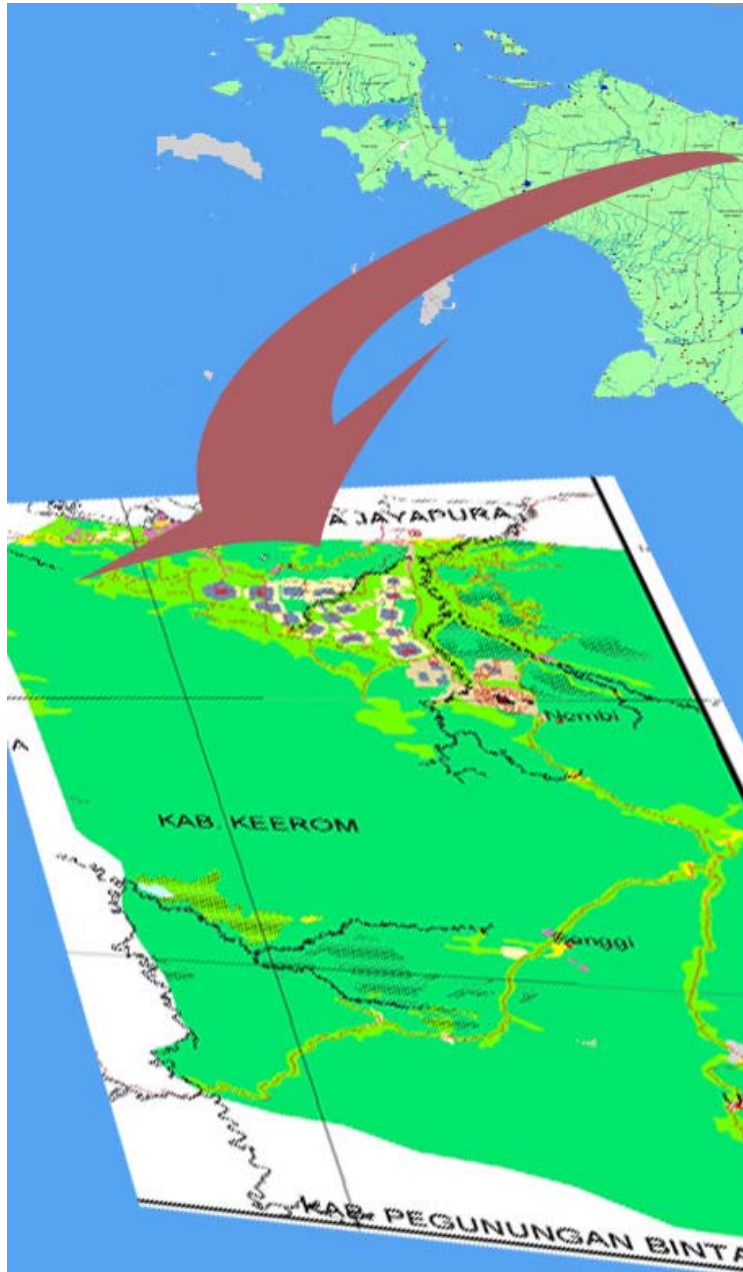


PERKEBUNAN SAWIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ARSO



TIM SKP-DEKENAT KEEROM:
Edy Rosariyanto OFM, Yohanes Rusmanta, P. John Jonga Pr.

SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA
JULI 2008

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Bab 1. Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Masalah	5
1.3 Manfaat Penulisan	5
1.4 Pengumpulan Data	5
Bab 2. Gambaran Umum	6
2.1 Pembagian Kampung Dalam Distrik Arso	6
2.2 Gambaran Geografis Distrik Arso	6
2.3 Gambaran Demografis	7
2.4 Bahasa	10
2.5 Mata Pencaharian	11
2.6 Sejarah Konflik Hak Ulayat	12
2.7 Sejarah Kelapa Sawit	12
2.8 Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)	12
2.9 Petani PIR-Trans	14
2.10 PTPN II Tanjung Morawa	14
2.11 PTPN II Kebun Arso	14
Bab 3. Kesejahteraan Masyarakat dan Dampak Perkebunan Sawit Bagi Masyarakat Arso	16
3.1 Lingkungan Hidup	16
3.2 Kehidupan Ekonomi	24
3.3 Kehidupan Sosial dan Budaya	31
3.4 Tanah Ulayat	36
3.5 Situasi Keamanan	40
Bab 4. Penutup	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42
Daftar Pustaka	43
Daftar Lampiran	44
Lampiran 1. Draft Action Plan Penyelesaian Permasalahan PIRSUS dan PIRKKPA PTPN II di Kabupaten Keerom Prop. Papua	44
Lampiran 2. Surat No. II.ARS/X/04/I/2008	45
Lampiran 3. Daftar Anggota Kelompok Tani Yang Menerima Gajian Kelapa Sawit Bulan Februari 2008	46
Lampiran 4. Surat No. II.AR/X/03/I/2005	48
Lampiran 5. Surat No. II.0/X/18/I/2004	49

Lampiran 6. Surat Pernyataan Pelepasan (1.310 ha)	50
Lampiran 7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (18.000 ha)	51
Lampiran 8. Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Jayapura	54
Lampiran 9. Keputusan tentang Pelepasan dan Penunjukkan Tanah Untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura.	55
Lampiran 10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Tentang Perubahan Lokasi Pencadangan Tanah Untuk Proyek Transmigrasi di Kecamatan Arso Daerah Tingkat II Jayapura.	57
Lampiran 11. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat (50.000 ha).	59
Lampiran 12. Surat Penolakan dari masyarakat terhadap uang Rp 50.000.000,-	63
Lampiran 13. Seruan oleh MUSPIDA Tk I Irian Jaya.	67
Lampiran 14. Notulen Diskusi Panel 5 Juli 2008	68

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dekenat Keerom khususnya wilayah Paroki St. Willibrodus-Arso dalam pelayanannya untuk membangun umat basis yang mandiri menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat pribumi yang bekerja sebagai petani sawit sedang menghadapi persoalan. Masyarakat pribumi dalam kurun waktu 25 tahun (sejak 1982/1983 sampai sekarang) telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha bertani kelapa sawit namun sampai saat ini dirasa belum berhasil mencapai harapan tersebut.



Perkebunan sawit yang diterima hadir di Arso ternyata membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut bisa dilihat dalam beberapa aspek seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, hak ulayat dan keamanan. Seorang wartawan dari harian Kompas (Aryo Wisanggeni) melaporkan bahwa pembukaan areal perkebunan sawit di Arso dan juga Merauke telah membawa dampak negatif terhadap masyarakat khususnya dari aspek pendapatan ekonomi, pola bertani, ketersediaan pangan, dan tanah ulayat.¹

Kesejahteraan yang belum dicapai oleh masyarakat pribumi rupanya juga dirasakan oleh masyarakat non pribumi seperti petani-petani sawit di kebun plasma (PIR) dan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Mereka mengeluhkan adanya hambatan-hambatan yang tidak mudah diselesaikan dalam kegiatannya untuk mencapai keberhasilan sebagai petani sawit yang tidak bisa diatasinya sendiri.

Upaya masyarakat untuk memecahkan persoalan sawit tersebut sudah dilakukan dari tingkat lokal (bertemu dengan DPR) sampai ke tingkat nasional (Jakarta). Usaha petani tersebut misalnya melalui Forum Peduli Nasib Petani PIR dan KKPA. Namun jawaban kongkrit terhadap persoalan petani tersebut hingga kini belum tuntas diselesaikan. Penyelesaian yang dilakukan hanya sampai pada selembar kertas yang disebut "Draft Action Plan Penyelesaian Permasalahan PIR dan KKPA PTPN II di Kabupaten Keerom."² Penyelesaian persoalan sawit yang tidak jelas menimbulkan pertanyaan mungkinkah semua pihak yang terkait dengan pengembangan sawit di Arso mau terlibat serius untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga masalah bisa diatasi dan akhirnya kesejahteraan

¹ Aryo Wisanggeni. *Kelapa Sawit: Menabur Benih di Tanah Peramu*. Kompas, 11 Januari 2008. Tulisan tersebut dapat juga dibandingkan dengan tulisan Dominggus A Mampioper dengan judul *Pembukaan perkebunan sawit tak mampu sejahteraan masyarakat Papua*. Berita tersebut ditulis dalam Berita Bumi 23 Oktober 2007.

² Draft Action Plan yang ditandatangani di Jakarta oleh Pemda Kabupaten Keerom, Wakil Petani, DPRD Kabupaten Keerom dan Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

masyarakat bisa tercapai ataukah pihak-pihak yang selama ini terkait hanya mau mengejar kepentingan sendiri dan mengabaikan nasib petani sawit?

Dekenat Keerom yang merupakan salah satu bagian dari Keuskupan Jayapura turut merasakan persoalan petani tersebut. Di bulan Nopember 2007 yang lalu, saat dilaksanakan pertemuan Tim Pastoral Dekenat Keerom di Abepura diusulkan perlunya program kerja untuk melihat persoalan-persoalan yang dialami oleh umat di Keerom khususnya menyangkut perkebunan sawit di Arso. Menghadapi kondisi umat yang dalam keadaan berbeban persoalan tersebut maka tahun ini Dekenat Keerom, bekerja sama dengan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura (SKP-KJ) terpanggil untuk lebih dekat menggali lebih dalam dampak perkebunan sawit dalam kaitannya dengan upaya para petani sawit untuk mencapai kesejahteraan mereka.

1.2 Masalah

Perkebunan sawit sudah mulai dikelola sejak tahun 1982/1983. Tujuan utama dari pengembangan kelapa sawit adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Berdasarkan tujuan tersebut, ada dua pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah kesejahteraan masyarakat yang sudah dijanjikan oleh perusahaan sudah tercapai?
- b. Apakah dampak perkebunan kelapa sawit dalam aspek lingkungan, ekonomi, sosial budaya, hak ulayat dan keamanan bagi masyarakat khususnya masyarakat asli Arso?

1.3 Manfaat Penulisan

Kegiatan penelitian ini berdasarkan masalah di atas diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Membantu tim pastoral Dekenat Kerom memahami situasi umatnya terkait dengan kesejahteraan petani sawit.
- b. Masyarakat menjadi sadar terhadap pilihannya di masa lalu terhadap perkebunan sawit.
- c. Membantu Pemerintah Daerah Kerom dalam menyingkapi dampak investasi sawit khususnya di Kabupaten Kerom.

1.4 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data tentang kesejahteraan masyarakat pribumi dan dampak dari perkebunan kelapa sawit dipergunakan tehnik wawancara langsung. Wawancara dilakukan terhadap beberapa penduduk di beberapa kampung yang berpenduduk masyarakat pribumi seperti Arso Kota, Kwimi, Workwana, Wembi dan desa-desa dengan penduduk didominasi oleh non pribumi seperti PIR I, II, V, Arso



³ Berdasarkan wawancara dengan masyarakat bahwa perusahaan PTPN II Tanjung Morawa Medan menjanjikan kesejahteraan kepada mereka bila masyarakat bersedia menerima perkebunan sawit dibuka di wilayahnya. Janji pihak perusahaan pada awal masuknya di Arso tersebut hingga kini masih diingkat.

VII, Arso XII. Wilayah tersebut secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Keerom sedangkan secara administrasi kegerejaan masuk dalam wilayah Dekenat Keerom-Keuskupan Jayapura.

Pengumpulan data juga dilakukan saat kegiatan refleksi sosial tanggal 30 Mei 2008 di Arso Kota yang melibatkan Dewan Adat Arso, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala-kepala desa, petani sawit. Refleksi sosial bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya petani sawit tentang kondisi yang saat ini sedang mereka rasakan dalam bidang ekonomi, sosial budaya akibat hadirnya perkebunan sawit.

BAB 2.

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Keerom terdiri dari beberapa distrik yang salah satunya adalah distrik Arso. Distrik Arso berbeda dengan distrik – distrik lain di Kabupaten Keerom, maupun kabupaten lainnya, terutama karena di sana terdapat sebagian besar wilayah perkebunan kelapa sawit PTPN II Kebun Arso dengan pabrik yang telah memproduksi. Masyarakat di Kabupaten Keerom terdiri dari penduduk asli Arso dan para pendatang dari berbagai daerah di dalam maupun di luar Papua.

2.1 Pembagian Kampung Dalam Distrik Arso

Wilayah Administrasi Distrik Arso dibagi ke dalam wilayah – wilayah Kampung (Desa): Sawanawa, Sawyatami, Wembi, UPT PIR I/Yanamaa, PIR II/Yamta, UPT PIR III/Bagia, UPT PIR IV/Wonorejo, UPT PIR V/Yamara, Workwana, Ubiyau, Kwimi, Arso Kota, Yuwanaim, Arso X/Yaturaharja, Asiaman, Arso XI/Ifia-Fia, Arso VI/Yamua, Arso VIII/Dukwia, Sanggaria, Arso VII/Warbo.

Setelah pemekaran pada Januari 2008, sebagian Kampung di Distrik Arso masuk ke Distrik Arso Timur.

2.2 Gambaran Geografis Distrik Arso

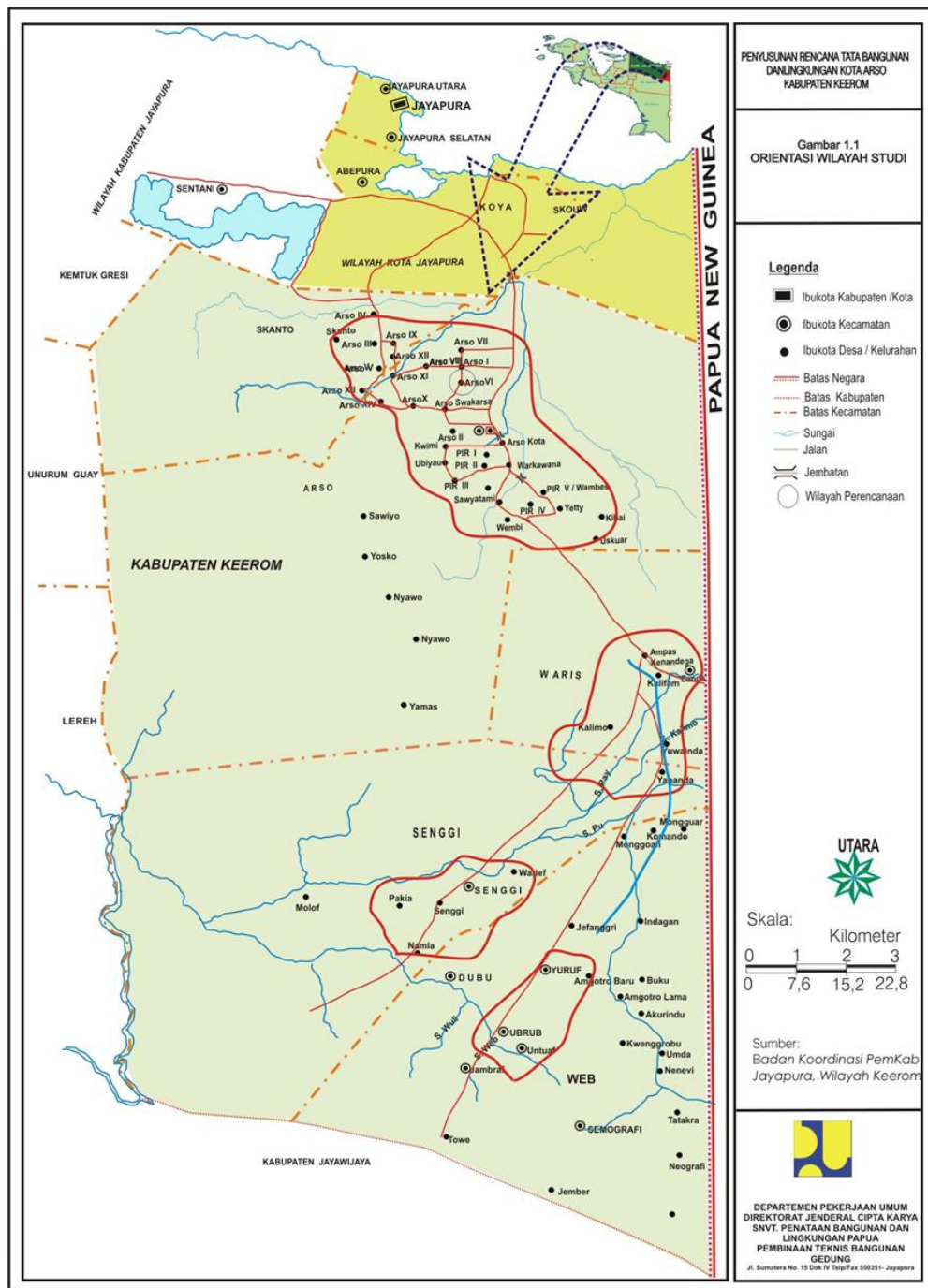
Luas Distrik Arso : 2.097,36 km² atau 22,40% dari luas keseluruhan Kabupaten Keerom (9.365 km² atau 936.500 ha). Ketinggiannya antara 0-1.000 meter dpl (di atas permukaan laut). Topografinya relatif datar dengan perbukitan yang sangat jarang.

Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kerom, luas hutan di Distrik Arso = 261.762 hektar, rawa = 348 hektar, permukiman = 454 hektar, lahan pertanian kering = 1.314 hektar, tegalan/ ladang = 5 hektar, dan tanah tandus 144 hektar.

Distrik Arso berbatasan dengan :

- Bagian Utara : Distrik Skanto
- Bagian Selatan : Distrik Waris dan Distrik Senggi
- Bagian Timur : Distrik Arso Timur
- Bagian Barat : Distrik Lereh (Kab. Jayapura)

Secara visual, Kabupaten Keerom dan Distrik Arso tergambar di dalamnya, tampak pada peta (Gambar 1).



Gambar 1 : Peta Kabupaten Keerom⁴

2.3 Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Distrik Arso menurut Sensus Penduduk tahun 2000 = 17.940 jiwa (9.654 laki-laki dan 8.286 perempuan). Namun jumlah penduduk Distrik Arso pada tahun 2006 adalah 23.537 jiwa. Jumlah ini tertinggi untuk Kabupaten Keerom. Di bawah ini disediakan tabel yang memuat data penduduk di setiap distrik.

⁴ Peta dibuat Oleh Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga per Distrik di Kabupaten Keerom Tahun 2006.

No.	DISTRIK	Jumlah Penduduk			Rumah Tangga
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Arso	12.831	10.706	23.537	5.443
2.	Skanto	7.943	6.848	14.791	3.263
3.	Web	1.879	1.481	3.360	708
4.	Waris	1.770	1.574	3.344	739
5.	Senggi	1.200	974	2.174	455

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Keerom dalam "Keerom dalam Angka 2007"

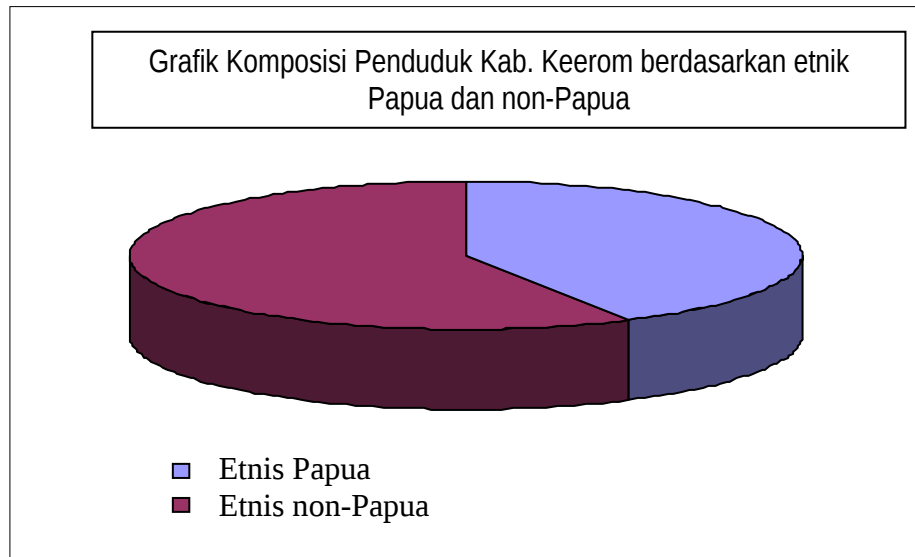
Setelah pemekaran distrik tahun 2007 yang lalu, terdapat tujuh distrik di Kabupaten Keerom. Tabel berikut ini menampilkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan etnik Papua/ non-Papua per distrik di Kabupaten Keerom.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Keerom Menurut Distrik Berdasarkan Etnik Januari 2008

NO	DISTRIK	PAPUA			Non-PAPUA			JUMLAH
		Laki-Laki	Perempn	Jumlah	Laki-Laki	Perempn	Jumlah	
1.	Arso	2.961	2.635	5.596	6.500	5.519	12.019	17.615
2.	Arso Timur	1.342	1.199	2.541	1.015	800	1.815	4.356
3.	Skanto	845	717	1.562	5.611	4.956	10.567	12.129
4.	Web	1.382	1.083	2.465	82	1	83	2.548
5.	Towe	601	496	1.097	0	0	0	1.097
6.	Senggi	1.079	889	1.968	208	156	364	2.332
7.	Waris	1.400	1.316	2.716	70	20	90	2.806
JUMLAH		9.610	8.336	17.945	13.486	11.452	24.938	42.883

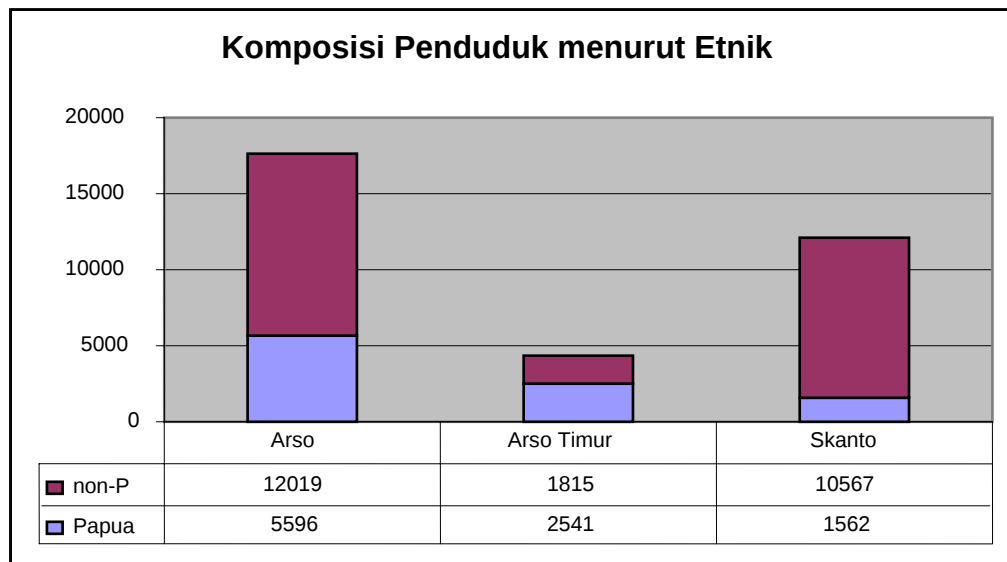
Sumber: Badan Pusat Statitik dan BAPPEDA Kabupaten Keerom, 2008

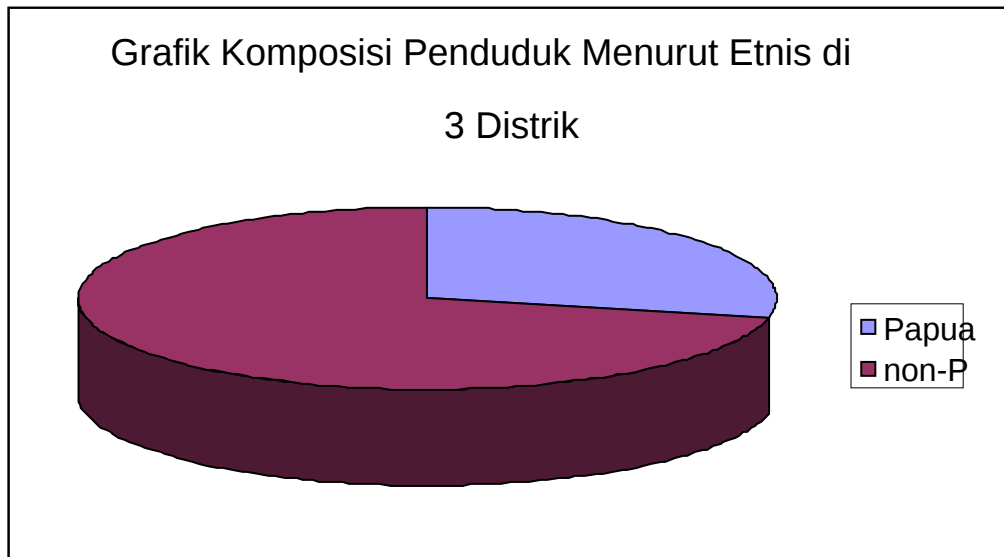
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk etnik Papua dibanding penduduk etnik non-Papua, adalah 41,8% berbanding 58,2%. Jumlah penduduk etnik non Papua di Kabupaten Keerom telah melebihi jumlah penduduk etnik Papua. Komposisi penduduk dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 2: Grafik Komposisi Penduduk Kab. Keerom berdasarkan etnik Papua dan non-Papua

Bila pengamatan dipusatkan pada tiga distrik yang selama ini digunakan sebagai lahan perkebunan sawit, yakni Arso, Arso Timur dan Skanto, maka akan diperoleh angka perbedaan yang lebih besar lagi dalam segi komposisi penduduk. Untuk jelasnya perbandingan penduduk etnis Papua di tiga distrik tersebut adalah 28,4% banding 71,6%. Tergambar dalam 2 grafik berikut.





Gambar 3: Grafik komposisi penduduk menurut etnik Papua dan non-Papua di Tiga Distrik(Arso, Arso Timur dan Skanto).

Jumlah penduduk asli Arso tentu lebih kecil daripada jumlah penduduk etnis Papua seperti yang ditampilkan di atas. Penduduk Arso etnis Papua terdiri dari orang – orang asli Arso dan suku – suku Papua lain yang berasal dari Pegunungan Tengah, Jayapura, Daerah Kepala Burung, dan sedikit dari Merauke, dan Teluk Cenderawasih. Adapun penduduk pendatang dalam hal ini transmigran dari Pulau Jawa, juga suku – suku lain dari luar Papua, seperti Batak, Padang, Bali, Bugis-Makassar, Toraja, Manado, Timor, Maluku; dan sedikit dari Kalimantan.

2.4 Bahasa

Bahasa – bahasa di Arso dan sekitarnya dapat dilihat pada Peta Sebaran Bahasa diterbitkan SIL (*Summer Institut of Linguistic*) tahun 2004. Seperti tampak pada gambar 4.

Penggolongannya mengacu pada hasil kompilasi bahasa-bahasa Papua bagian Timur Laut menurut C.L. Voorhoeve⁵, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

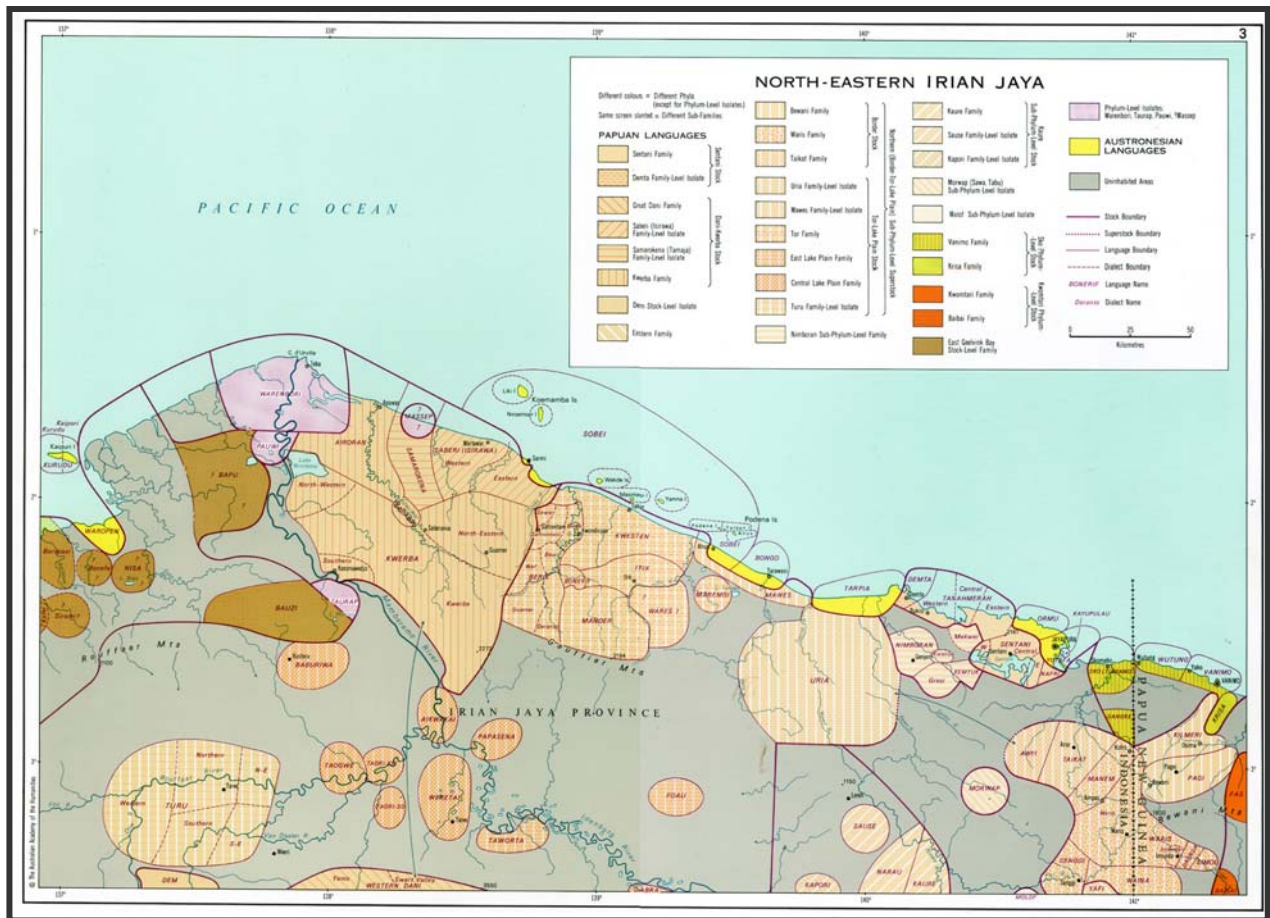
Phylum: Trans New Guinea
 Sub-Phylum: Northern-Border-Tor-Lake Plain
 Stock : Northern

 Family : Waris
 Language : Manem, Waris, and Senggi

 Family : Taikat (Arso)
 Language : Awyi and Taikat

⁵ Sumber: <http://www.papuaweb.org/gb/peta/pl/ne-irja-index.gif>, diakses tgl 5 Juni 2008 pukul 13.30 WP

Gambar 4: Peta Sebaran Bahasa-Bahasa di Papua Bagian Timur Laut⁶



Sumber lain menyatakan bahwa, Bahasa masyarakat Arso asli digolongkan dalam tujuh kelompok⁷ dialek yaitu Dianem, Abrab, Awi, Meref, Cireregirwaja, Maloof, Skofrokriku. Dialek-dialek ini dipakai di kampung-kampung: Arso, Bagia, Workwana, Sawyatami, Kwimi, Ubyauw, Wemby, Wambes, Skamto, dan Yamas.

2.5 Mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat pribumi (terutama sebelum daerah ini terbuka untuk perkebunan sawit) adalah meramu. Mereka hidup dari kemurahan alam yang kaya. Makanan pokok mereka adalah sagu. Sumber protein berasal dari hewan buruan seperti babi hutan, tikus tanah, burung, dan berbagai jenis ikan.

Sebelum daerah Arso “terbuka”, kawasan ini diliputi hutan rimba. Seorang tokoh melukiskan Arso sebagai berikut:

"Sebelum adanya Trans Irian, Arso adalah daerah yang sangat terisolir. Daerah yang penuh dengan dusun sagu dan kaya dengan hasil hutan. Untuk sampai di sana dibutuhkan waktu kurang lebih lima hari sampai satu minggu dengan berjalan kaki melewati hutan rimba."

⁶ Sumber: <http://www.papuaweb.org/gb/peta/pl/ne-irja-2000.jpg>, diakses tgl 5 Juni 2008, pukul 14.10 WP

7 John Jonga. *Dampak PIR Kelapa Sawit Arso Terhadap Ruang Gerak Masyarakat Arso*. Kabar Dari Kampung No. 61/Th XI, Agustus 1993. Hal 8.

Demikianlah ungkapan masyarakat saat itu terhadap kondisi daerahnya yang penuh dengan kekayaan dan masih terisolir.

2.6 Sejarah Konflik Hak Ulayat

Masuknya perkebunan sawit di Arso tidak seluruhnya bisa langsung diterima oleh masyarakat. Di PIR V ondoafi Workwana menolak untuk melepaskan tanahnya. Awal dari persoalan tersebut adalah tidak dilibatkannya bapak ondoafi dalam proses awal pelepasan tanah 1.310 ha yang sekarang dipakai oleh perusahaan sebagai kebun inti kelapa sawit.

Konflik antara masyarakat dengan pihak keamanan juga pernah terjadi di Arso. Masyarakat yang mencoba untuk menghalangi pembukaan areal kebun inti sawit ditahan oleh aparat keamanan namun kemudian dibebaskan kembali.

2.7 Sejarah Kelapa Sawit⁸

Kelapa Sawit (*Elaeis guinensis* Jack) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Ada juga yang menyatakan berasal dari Barzil, karena lebih banyak ditemukan spesiesnya di hutan Brazil ketimbang Afrika. Namun demikian, Kelapa Sawit dapat tumbuh di luar tempat asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, dan Thailand.

Kelapa Sawit masuk pertama ke Indonesia dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman sawit mulai dibudidayakan secara komersial tahun 1911. Kelapa sawit kemudian dikembangkan dan akhirnya sampai di Arso. Kelapa sawit masuk Arso dibawa oleh perusahaan sawit.

2.8 Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)⁹

Pola PIR dirancang tahun 1974/1975 dan diperkenalkan dalam bentuk Proyek NES/PIR-BUN di daerah perkebunan pada 1977/1978. Dalam konsep PIR, perusahaan perkebunan baik pemerintah maupun swasta berperan sebagai inti, sedangkan perkebunan rakyat sebagai plasma atau peserta.

Pemerintah (Dirjen Perkebunan) mengakui masih memiliki beberapa kelemahan dalam pola PIR antara lain tata hubungan antara plasma dan inti belum diatur secara mantap dan terinci, terutama tahap pengalihan pemilikan tanah proyek dan masih kurangnya kesatuan pandang tentang konsep PIR oleh instansi-instansi terkait.

PIR-Trans merupakan pengembangan pola perkebunan yang dimaksudkan untuk menyelaraskan antara program pengembangan perkebunan dengan program transmigrasi yang dikembangkan pemerintah. Pola PIR-Trans ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 1 tahun 1986, tentang pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang dikaitkan dengan transmigrasi. Ada empat pertimbangan yang melatarbelakangi diterapkannya pola PIR-Trans yaitu untuk meningkatkan produksi komoditas nonmigas, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah, dan menunjang keberhasilan program transmigrasi.

Peserta PIR-Trans sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 adalah sebagai berikut:

⁸ Ir. Yan Fauzi, dkk. *Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya. Jakarta: 2007. Hal 1-2.

⁹ *Ibid*. Hal 8.

- a. Transmigran (ditetapkan oleh Menteri Pertanian)
- b. Penduduk setempat, termasuk para petani yang tanahnya termasuk dalam proyek PIR-Trans (ditetapkan oleh pemerintah daerah).
- c. Petani atau peladang berpindah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek (ditetapkan oleh pemerintah daerah).

Perusahaan inti dan petani peserta memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

1. Hak

Perusahaan inti berhak atas lahan perkebunan inti. Lahan tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 35 tahun. Pada waktu akan berakhir dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Lahan kebun inti dimanfaatkan untuk kebun inti, emplasemen (satuan bangunan), dan pabrik pengolahan. Biaya untuk pengembangan kebun inti, termasuk fasilitas pengolahannya menjadi tanggung jawab perusahaan inti.

Petani peserta berhak atas lahan pekarangan, termasuk rumah seluas 0,5 ha dan lahan kebun plasma seluas 2 ha. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk rumah dan pengusahaan tanaman pangan. Lahan pekarangan diserahkan apabila telah siap diolah dan rumah selesai dibangun di atasnya. Sementara lahan kebun diserahkan apabila tanaman yang diusahakan telah mencapai umur menghasilkan dan memenuhi standar fisik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, serta petani peserta telah menandatangani kredit dari bank pemerintah. Lahan kebun plasma dan pekarangan merupakan hak milik petani peserta. Namun sertifikatnya disimpan di bank sebagai agunan.

Untuk PIR-Trans kelapa sawit, pada tahap permulaan produksi yaitu pada tahun keempat, perbandingan antara luas kebun inti dengan kebun plasma dapat dimulai dengan 40:60. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 tahun, secara bertahap perbandingan keduanya harus mencapai 20:80.

2. Kewajiban

Perusahaan inti memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Membangun perkebunan inti, lengkap dengan fasilitas pengolahannya untuk menampung hasil perkebunan inti dan plasma.
- b. Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk dan standar fisik yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perkebunan.
- c. Bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan rumah petani peserta sesuai dengan petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi.
- d. Memberikan petunjuk teknis budi daya kepada petani peserta.
- e. Membeli seluruh hasil kebun plasma dengan harga beli yang layak sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- f. Membantu proses pengembalian kredit petani peserta.

Petani peserta PIR-Trans memiliki kewajiban:

- a. Mengganti biaya pembangunan kebun plasma. Untuk itu petani peserta mendapat kredit lunak jangka panjang dari pemerintah.
- b. Mengusahakan kebun plasma sesuai dengan petunjuk teknis budi daya yang diberikan oleh perusahaan inti.
- c. Menjual seluruh hasil kebun plasma kepada perusahaan inti.

2.9 Petani PIR-Trans

Sampai dengan tahun 1990 sudah ditempatkan sebanyak 1.207 KK petani PIR-Trans di Arso. Namun direncanakan petani PIR-Trans akan mencapai 1800 kk. Petani tersebut akan mengusahakan lahan seluas 3.600 ha.

Peserta petani PIR-Trans untuk PIR I yang berjumlah 250 kk berdasarkan asal daerahnya dibagi menjadi:

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------|
| a. | Asli Arso | : 74 kk |
| b. | Serui, Biak, Tanah Merah (Jayapura) | : 44 kk |
| c. | Maluku dan Makasar | : 25 kk |
| d. | Jawa | : 107 kk |

Berdasarkan data tersebut maka keadaan penduduknya bersifat heterogen (lebih dari satu suku dalam satu lokasi).¹⁰

2.10 PTPN II Tanjung Morawa¹¹

PT Perkebunan Nusantara II (Persero), disingkat PTPN II dibentuk berdasarkan PP No. 7 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996. Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merupakan penggabungan kebun-kebun di Wilayah Sumatera Utara dari eks PTP II dan PTP IX. Selain itu dikembangkan juga tanaman kelapa sawit di wilayah Irian Jaya yaitu di Kabupaten Manokwari dan Jayapura.

Komoditi utamanya adalah kelapa sawit, karet, kakao, gula dan tembakau. Areal konsesi seluas 103.860 hektar. Kebun kelapa sawit inti seluas 61.577 ha, ditambah plasma seluas 25.250 hektar milik petani plasma.

Visi PTPN II Tanjung Morawa (yang juga memiliki kebun di Arso dan Prafi) adalah turut melaksanakan serta menopang kebijaksanaan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional umumnya. Khususnya dalam sub sektor perkebunan dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Sedangkan misinya adalah profitisasi melalui pendayagunaan, pengelolaan perusahaan di bidang perkebunan, dengan mengusahakan lima budidaya komoditi unggulan yakni kelapa sawit, karet, kakao, tembakau dan tebu secara efisien, ekonomis sehingga dapat mencapai produk yang memenuhi standard kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen, serta melakukan diversifikasi usaha yang dapat mendukung kinerja perusahaan. Pengelolaan produksi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, memiliki daya saing yang kuat, serta meningkatkan kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri guna kelangsungan usaha dalam mendukung pertanian perkebunan.

2.11 PTPN II Kebun Arso

Tahun 1982/1983 Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa Medan membuka areal kerjanya di Provinsi Papua (1982 masih bernama Provinsi Irian Jaya).¹² Jenis kegiatan yang diusahakan adalah

¹⁰ Marthin Patay, dkk. *Op.cit.* Hal. 7.

¹¹ Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara. *Profil Singkat PTP Nusantara II*. Diakses melalui www.kpbptpn.co.id/profile tanggal 5 Juni 2008 (jam 12.00 wp).

¹² Marthin Patay, *Studi Kehadiran PTP-II Perusahaan Inti Rakyat Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Petani Calon Peserta Plasma di Prafi-Manokwari dan Arso-Jayapura Irian Jaya*, Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya, Jayapura 1991, hal 1

perkebunan kelapa sawit dengan mengembangkan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Maka sampai 2008 lebih kurang telah duapuluh lima tahun PTPN II Tanjung Morawa beraktivitas di Papua.

Pola PIR dikembangkan di Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan harkat petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha taninya.¹³ Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan mensejahterakan kehidupan petani melalui program perkebunan dilakukan melalui penyempurnaan perizinan usaha perkebunan melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999.¹⁴ Dalam SK tersebut disebutkan bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan pelestarian lingkungan hidup serta sebagai instrumen pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat.

Program PIR oleh PTPN II Tanjung Morawa Medan di Papua dikembangkan di Arso-Kabupaten Kerom (tahun 1982 masih masuk dalam Kabupaten Jayapura) dan Prafi-Kabupaten Manokwari. Program PIR diharapkan dikembangkan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai petani (petani plasma). Aktivitas petani didukung oleh perusahaan perkebunan besar sebagai inti. Hubungan kerja antara petani plasma dan perkebunan dijalin suatu sistem yang sama-sama saling menguntungkan.¹⁵ Dengan kerja sama tersebut maka diharapkan petani memperoleh manfaat sebesar-besarnya demikian juga perusahaan sebagai pengelola.

Data yang dikutip dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dalam Keerom Dalam Angka (2007) mengungkapkan luas Kebun Sawit di Kabupaten Keerom mencapai 11.921 hektar dan luas panen 10.195 ha. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh PTPN II Arso dalam Keerom Dalam Angka (2007) mengungkapkan luas panen sawit tahun 2006 adalah 8.339 Ha. Luas areal panen tersebut berasal dari kebun plasma (3.600 ha), kebun inti (1.871 ha), KKPA (1.800 ha) dan Bumi Irian Perkasa (1.068 ha). Jadi pabrik kebun sawit milik PTPN II kebun Arso mengolah sawit yang berasal dari 8.339 ha.

Pabrik kelapa sawit beroperasi sejak April 1992 dengan kapasitas 15 ton TBS/jam. Sejak 21 Agustus 1994 terjadi peningkatan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari 15 ton TBS/jam menjadi 30 ton TBS/jam.¹⁶ Namun saat ini pabrik hanya mampu mengolah 14 ton TBS/jam atau 300 ton/hari.



¹³ Ir. Yan Fauzi, dkk. *Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya. Jakarta: 2007. Hal 9.

¹⁴ *Ibid*. Hal 8

¹⁵ Marthin Patay. *Op.cit*. Hal 2.

¹⁶ PTP II Kebun Arso. *Laporan Singkat Pada Kunjungan Bapak Direksi PTP II Tanjung Morawa-Medan*. Arso: PTPN II Kebun Arso, 1994.

BAB 3.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAMPAK PERKEBUNAN SAWIT BAGI MASYARAKAT ARSO

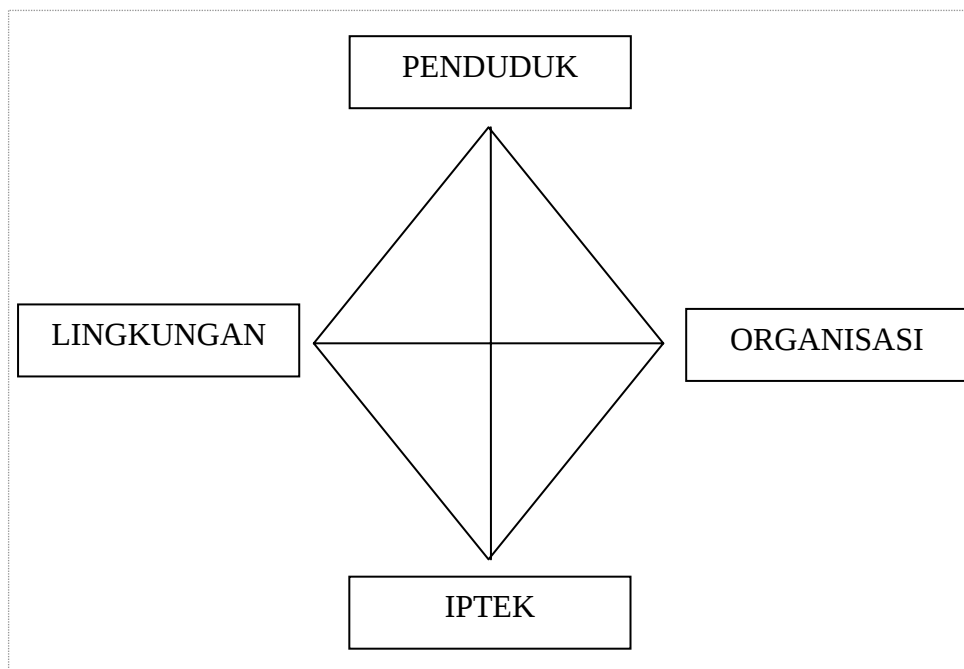
Kesejahteraan yang diharapkan dapat dicapai baik oleh masyarakat dalam hubungan dengan pengelolaan perkebunan sawit PTPN II Kebun Arso selama duapuluh lima tahun dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut ini:

3.1 Lingkungan Hidup

Terdapat empat komponen dalam lingkungan hidup atau ekologi manusia, yakni:

1. Komponen Manusia itu sendiri (Penduduk)
2. Komponen Daya Dukung Alam (Lingkungan)
3. Komponen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
4. Komponen Orsanisasi

Keempat komponen ini saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Ketergantungan dan saling mempengaruhi ini membentuk suatu sistem yang oleh Schnore dan Duncan (1958/1959) yang dirumuskan ulang oleh Wisnu Arya Wardhana disebut sebagai *Ecological Complex*.¹⁷ Secara skematik terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5: Sistem Ekologi Manusia

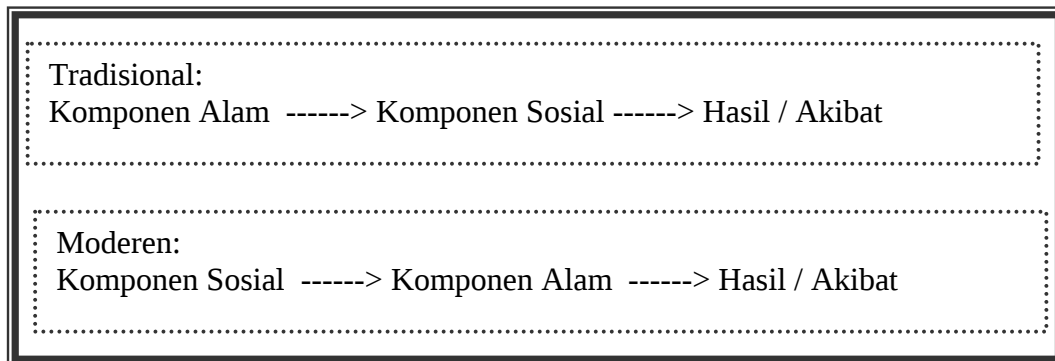
Penduduk adalah komponen pertama dari ekologi manusia, bila jumlahnya semakin banyak akan semakin banyak pula kekayaan alam yang harus diambil untuk mencukupi kehidupannya. Pengolahan kekayaan alam tergantung pada daya dukung alam (**lingkungan**) yang ada. Agar dapat mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam secara baik diperlukan campur tangan **IPTEK**. Peranan IPTEK dapat berkembang baik apabila masyarakat manusia (**penduduk**) mempunyai sistem **organisasi** yang baik.

¹⁷ Wisnu Arya Wardhana. *Dampak Pencemaran Lingkungan*., Yogyakarta: Andi Offset, 1985. hal. 11

Empat komponen di atas dapat diringkas menjadi dua komponen saja, yang dalam ekologi dikenal pula dengan komponen alam dan komponen sosial. Keduanya saling berkaitan dan menentukan kelangsungan hidup manusia.

- Komponen Alam : meliputi semua bagian dari alam, seperti tanah, air, hutan, tanaman, hewan, udara, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- Komponen Sosial : meliputi unsur-unsur pokok, seperti manusia, kelompok masyarakat, dan organisasi.

Untuk daerah yang masyarakatnya masih tradisional, komponen yang dominan adalah Komponen Alam. Sedangkan untuk daerah maju/ moderen, Komponen Sosial yang lebih dominan.



Gambar 6 : Hubungan Komponen Alam, Komponen Sosial dan Hasil/Akibat

Berikut ini beberapa perbandingan ciri khas masyarakat peramu, pertanian, dan industri; untuk melihat hubungan timbal-baliknya antar komponen seperti yang digambarkan pada dua skema di atas.

Kehidupan Masyarakat Peramu:

1. Hidup selalu berpindah-pindah (rotasi), atau menetap sementara.
2. Mahir menggunakan peralatan dan senjata tradisional.
3. Menguasai lingkungan alam sekitarnya, mahir mencari sumber makanan dan sumber air untuk kehidupannya.
4. Tingkat populasinya rendah dan belum mengenal teknologi.
5. Berkat tempaan alam, daya tahan hidupnya kuat.
6. Tidak mengenal konservasi sumber daya alam (karena hidupnya sebenarnya berada dalam konservasi)
7. Kerusakan lingkungan terjadi karena penggunaan api.

Kehidupan Masyarakat Pertanian:

1. Hidup menetap dekat tempat kerjanya (lahan pertanian).
2. Berusaha menyerap teknologi baru yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, meskipun pekerjaan masih dilakukan dengan tenaga manusia.
3. Menguasai jenis tanaman dan hewan yang sesuai dengan lingkungan alamnya.
4. Tingkat populasi tinggi, sehingga cenderung menambah luas lahan pertanian. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
5. Mengetahui stok (penyimpanan) pangan, daya tahan hidupnya baik.
6. Sudah mengenal konservasi SDA.
7. Kerusakan lingkungan karena penggunaan bahan kimia pemberantas hama.

Kehidupan Masyarakat Industri:

1. Hidup menetap walaupun tidak harus dekat dengan tempat kerjanya, karena kemudahan transportasi.
2. Berusaha menggunakan teknologi baru, sehingga banyak menyerap energi. Pekerjaan bersifat padat teknologi yang berarti mengurangi jumlah tenaga kerja.
3. Menguasai teknologi baru dan menghasilkan produk yang berlimpah.
4. Tingkat populasi sedang, daya tahan hidup lemah karena adanya penyakit - penyakit baru akibat dampak industri.
5. Mengeruk kekayaan alam secara besar-besaran.
6. Konservasi SDA sangat diperhatikan, karena adanya kekhawatiran akan berkurangnya daya dukung alam.
7. Terjadinya kerusakan lingkungan karena dampak pencemaran akibat industri dan pemakaian energi yang berlebihan.

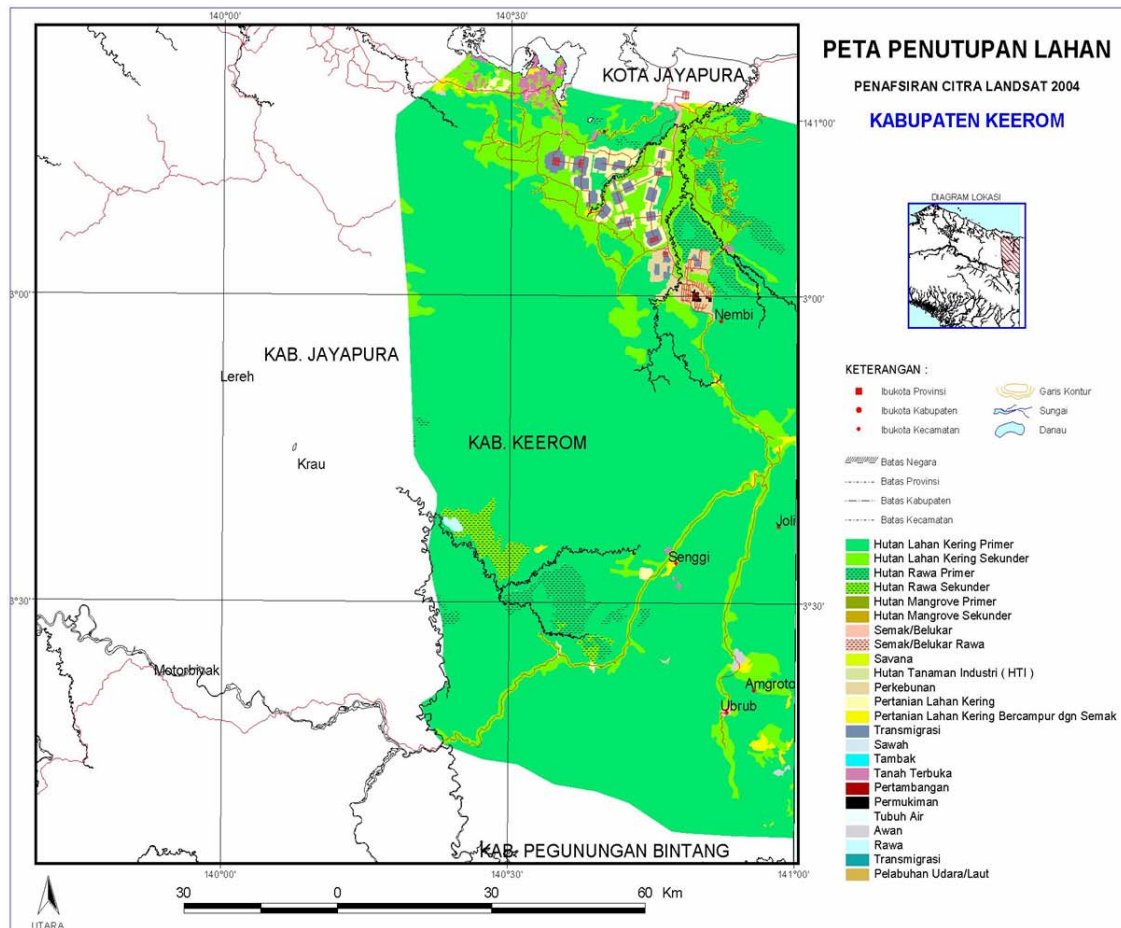
Singkat kata, komponen alam (lingkungan) kualitasnya akan menurun apabila tidak didukung oleh pengelolaan yang baik oleh manusia (komponen sosial). Demikian pula, komponen alam yang buruk, berakibat pada penurunan kualitas hidup manusia, terutama kenyamanan hidup dan kesehatannya.

Dampak langsung dari penurunan kualitas lingkungan adalah:

1. Meningkatnya Bencana Alam akibat ulah manusia (banjir dan tanah longsor akibat degradasi hutan).
2. Bertambahnya jenis penyakit menular, luas epidemi, dan jumlah penderita, akibat pencemaran air, udara, maupun tanah.
3. Meningkatnya beberapa jenis penyakit tidak menular seperti keracunan pestisida

Berikut ini telaah mengenai ekologi masyarakat Arso berdasarkan beberapa prinsip yang telah dikemukakan di atas.

Daerah Arso mengalami perubahan drastis sejak sebelum masuknya perkebunan sawit dan transmigrasi tahun 1985 hingga kini. Kawasan yang dahulunya hutan rimba, kini telah berubah menjadi perkebunan, permukiman, lahan sawah -ladang, semak belukar, dan lahan kering. Hal ini tergambar pada Peta Tutupan Lahan pada Gambar 7.



Gambar 7: Peta Tutupan Lahan Kabupaten Keerom¹⁸

Komponen Alam paling penting dari masyarakat (asli) Arso adalah HUTAN. Di hutan hidup berbagai macam tumbuhan dan hewan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Ketersediaan makanan untuk hidup sehari-hari diambil dari hutan. Hutan telah menjadi bank makanan alami warisan nenek moyang bagi masyarakat.

Aktivitas masyarakat di dalam hutan meliputi berburu binatang, mencari ikan, mencari sayur, mencari sagu, mengumpulkan kayu bakar, sumber obat-obatan alami, menebang pohon untuk diambil kayunya yang kemudian dijadikan tiang, dinding juga alas rumah. Atap rumah tradisional juga diambil dari hutan. Semuanya tersedia bagi masyarakat yang mau mencari dan mengusahakan untuk menemukannya. Itulah hutan asli masyarakat Arso.

Sekitar tahun 1982/1983, potensi hutan tersebut dibabat sedikit demi sedikit. Sejak tahun 1983 -1992 paling kurang sudah dibuka lahan seluas 3.600 ha untuk perkebunan sawit.¹⁹ Hutan dibabat, batang-batang kayu yang sudah rebah dibiarkan hingga kering lalu dibakar. Babi hutan dan binatang lain akhirnya menyingkir karena habitat hidupnya telah dibabat dan dibakar. Pohon-pohon sagu yang sempat tegak berdiri akhirnya juga habis terbabat. Sayuran-sayuran seperti daun gnero dan sayur paku juga telah hilang dari areal perkebunan tersebut. Burung-burung yang biasanya bebas terbang, hinggap dan

¹⁸ Dibuat tahun 2005 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Papua, suatu lembaga yang menjadi bagian dari Badan Planologi Departemen Kehutanan RI.

¹⁹ Dikalkulasi berdasarkan data dari laporan PTPN II Kebun Arso tahun 1994.

mengejar serangga juga berpindah karena tidak lagi mendapat tempat di lahan sawit. Ikan-ikan yang hidup terjamin karena cukup makanan dari tumbuh-tumbuhan air juga akhirnya pelan-pelan mulai berkurang. Tak lama kemudian tampaklah lahan kosong yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi padahal di tempat tersebut pernah hidup banyak ragam tumbuhan dan hewan yang berguna untuk kehidupan masyarakat. Hutan sebagai kekayaan alam yang alami dan telah memberi makan nenek moyang orang Arso sampai generasi yang sekarang secara pelan namun pasti mulai habis dibabat demi alasan kelapa sawit yang katanya lebih mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat asli Arso. Alasan kesejahteraan telah menghapus keindahan kekayaan hutan yang ada di Arso. Kesempatan untuk mencari sagu masih bisa dilakukan, namun kesempatan untuk menemukan babi, ikan, burung, kayu untuk bangunan bukan merupakan hal yang mudah lagi seperti dulu. Masyarakat perlu berjalan berjam-jam bahkan sehari-hari bila mau berburu babi.

Luas wilayah Kabupaten Keerom adalah 9.365 Km² atau setara dengan 936.500 ha. Sedangkan luas Distrik Arso adalah 2.097 Km² atau setara dengan 209.700 ha.²⁰ Perbandingan antara luas kabupaten dan luas distrik Arso berarti luas distrik Arso adalah 22,40% dari luas Kabupaten Keerom.²¹ Bila mengacu kepada laporan yang dikeluarkan oleh PTPN II kebun Arso maka sampai dengan 1992 luas lahan untuk perkebunan sawit sebagai berikut:

Tabel 4. Luas Lahan Untuk Perkebunan Sawit Tahun 1992

Penggunaan lahan	Luasan (Ha)
Kebun petani plasma	3.600
Areal kebun inti	2.162
Total keseluruhan	5.762

Dari laporan tersebut nampak bahwa luas hutan semakin berkurang hingga mencapai angka 5.762 ha. Hal ini tidak termasuk luasan areal untuk pemukiman baik untuk petani maupun karyawan PTPN II Kebun Arso.

PTPN II Kebun Arso melaporkan bahwa tahun 2006 luasan panen kelapa sawit adalah 8.339 ha.²² Rincian pembagian luas panen sawit tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Luas Lahan Panen Sawit Tahun 2006

Penggunaan lahan	Luasan (Ha)
Kebun petani plasma	3.600
Areal kebun inti	1.871
KKPA (transmigran)	1.800
BIP	1.068
Totak Keseluruhan	8.339

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 maka paling sedikit dalam rentan waktu 1992 s.d. 2006 terjadi penambahan luas areal perkebunan sawit hingga 2577 ha.

²⁰Badan Pusat Statistik (BPS). *Keerom Dalam Angka 2007*. Keerom: BPS, 2007. hal 13

²¹*Ibid*, hal 15

²²*Ibid*, hal 213

Informasi terakhir menunjukkan bahwa realisasi tanam oleh PTPN II Kebun Arso telah mencapai 10.700 ha dari 57.000 ha yang direncanakan.²³

Dinas Pertanian Kabupaten Keerom mengeluarkan data luas hutan dalam tabel luas lahan bukan sawah menurut penggunaannya per distrik.²⁴ Juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan data luas wilayah Kabupaten Keerom per distrik.²⁵ Bila kedua data tersebut (luas hutan dan luas wilayah) dibandingkan maka nampak ada perbedaan di dalamnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Luas wilayah dibandingkan dengan luas hutan per distrik

Distrik	Luas wilayah (ha)	Luas hutan (ha)	Keterangan
Waris	91.194	94.550	Tidak realistis karena luas hutan lebih besar dari luas wilayah
Arso	209.736	261.762	Sda
Senggi	308.855	283.833	Realistis
Web	176.250	143.024	Realistis
Skanto	150.465	135.245	Realistis
Total	936.500	918.414	Realistis

Sumber: data gabungan antara BPN (luas wilayah) dan Dinas Pertanian (luas hutan) dalam buku Keerom Dalam Angka 2007

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi juga mengeluarkan data luas lahan menurut penggunaannya di Kabupaten Keerom.²⁶ Perincian penggunaan lahan tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 7. Luas Lahan Menurut Penggunaan Tanah di Kabupaten Keerom

Penggunaan tanah	Luas (Ha)
Hutan lahan kering	116.384,328
Hutan produksi terbatas	177.175,700
Hutan lindung	344.816,492
Hutan produksi konversi	223.920,504
HPPA	2.733,590
Areal penggunaan lain	103.381,200
Total	968.411,814

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua

²³ Arti Ekawati. *13 Perusahaan Sawit Ajukan Izin di Papua*. Koran Tempo, Senin, 2 Juni 2008.

²⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). *Keerom Dalam Angka 2007*. Keerom: BPS, 2007. hal 17

²⁵ *Ibid*, hal 15

²⁶ *Ibid*, hal 27

Data luas lahan menurut penggunaannya yang dikeluarkan oleh BPN adalah 968.411,814 ha dan bila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Keerom yang juga dikeluarkan oleh BPN ternyata tidak sama yaitu 936.500 ha.

Laporan luasan hutan di Kabupaten Keerom berdasarkan data dari instansi BPN dan Pertanian tampak masih utuh namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa sudah banyak wilayah yang dimanfaatkan untuk pemukiman, persawahan, perkantoran dan sarana jalan.

Hutan yang bisa disebut sebagai jantung kehidupan masyarakat pribumi Arso sudah banyak berkurang. Jadi bukan hanya tumbuhan yang berkurang tapi binatang (babi, burung, tikus) juga berkurang. Hutan sebagai modal untuk masa depan untuk anak cucu sudah berganti dengan kelapa sawit yang tidak bisa diharapkan lagi menjadi modal untuk masa depan.

3.1.1. Bencana Alam

Pengubahan fungsi lahan dari hutan menjadi lahan perkebunan, permukiman, sawah-ladang, semak-belukar maupun lahan kering, mengakibatkan perubahan siklus hidrologi. Daya simpan /serap air dalam tanah akan berkurang. Erosi meningkat mengakibatkan sedimentasi pada sungai – sungai dan rawa. Akibatnya air akan melimpah pada musim hujan dan kekeringan melanda pada musim kemarau.



"Dulu di sini sering banjir, tetapi sekarang lebih sering lagi", demikian pengakuan seorang tokoh masyarakat Arso²⁷.

Belum ada catatan mengenai kerugian yang timbul akibat banjir di Arso dan banjir "iriman" di wilayah Distrik Kali Tami Kota Jayapura yang berasal dari Arso. Namun apabila degradasi hutan dan deforestasi terus berlangsung, maka intensitas dan frekwensi banjir di daerah ini akan terus meningkat.

Kejadian banjir (dan kekeringan di musim kemarau) akan mengakibatkan krisis air bersih, gagal panen yang menghasilkan krisis pangan, dan peningkatan penularan penyakit.

3.1.2. Kesehatan

Mengukur derajat kesehatan, diperlukan beberapa indikator. Sebagai contoh, sebuah survey yang pernah dilakukan di Kota Tangerang, menggunakan beberapa indikator. Untuk mengukur keberhasilan program kesehatan lingkungan digunakan "angka kejadian penyakit berbasis lingkungan", yakni Diare, TB Paru, ISPA, Pneumonia, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan malaria. Indikator kesehatan lingkungan diukur menggunakan data: pemilikan sumber air, jamban, tempat sampah, sarana pembuangan air limbah, dan kualitas air

²⁷ Disampaikan pada Refleksi Sosial, 31 Mei 2008 bertempat di Aula Paroki Arso.

bersih. Sedangkan status kesehatan diukur menggunakan data: angka kematian bayi dan angka kematian ibu.²⁸

Sumber lain lagi menggunakan empat indikator untuk menilai keadaan lingkungan dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat, yaitu persentase keluarga yang memiliki akses air bersih, presentase rumah sehat, keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar, Tempat Umum dan Pengolahan Makanan (TUPM).²⁹

Untuk Arso (atau Kabupaten Keerom secara keseluruhan) belum ada data yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan, namun berikut ditampilkan beberapa data yang nantinya dapat dipakai untuk mengukur hal tersebut.

Tabel 8. Jumlah Penderita yang dilaporkan pada Dinas Kesehatan menurut Jenis Penyakit, tahun 2004 – 2006

No.	Jenis Penyakit	2004	2005	2006
1.	Diare (termasuk tersangka Kolera)	2.362	2.203	2.904
2.	Disentri Basiler	520	402	560
3.	Tuberculose Klinis	878	251	301
4.	Malaria Tropika	6.465	7.329	10.051
5.	Malaria Tertiana	1.961	2.045	4.293
6.	Malaria Mix	298	101	711
7.	Malaria Klinis	20.709	19.244	19.999
8.	Cacingan	830	832	726
9.	Scabies	658	1.179	1.894
10.	ISPA	17.668	19.349	21.544
11.	Pnemonia	341	335	409
12.	Bronchitis	186	132	494

Sumber: DinKes Kab. Keerom, dalam *Keerom dalam Angka 2007*

Tabel 9. Jumlah Penderita TB Paru yang terdaftar di Puskesmas menurut Disrik, tahun 2003-2006

No	Distrik	2003	2004	2005	2006
1.	Waris	0	0	20	10
2.	Arso	473	809	208	200

²⁸ Anwar Musadad, Dkk. *Pengembangan Model Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan (PBL) Melalui pendekatan Kota Sehat*. Sebuah Abstrak, diakses di <http://www.ekologi.litbang.depkes.go.id/data/abstrak/> AMusadad2, pada tgl 5 Juni 2008, pukul 10.15 WP

²⁹ Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. *Kesehatan Lingkungan*. Diakses di <http://www.dinkes-kabtangerang.go.id/index>, pada tanggal 15 Juni 2008, pukul 12.15 WP

3.	Senggi	31	35	1	8
4.	Web	8	0	8	5
5.	Skanto	98	34	14	13

Sumber: DinKes Kab. Keerom, dalam *Keerom dalam Angka 2007*

Tabel 10. Sumber Air Minum yang digunakan Rumah Tangga tahun 2006

No.	Sumber Air Minum	Rumahtangga	Persentase (%)
1.	Air dalam Kemasan	249	2,35
2.	Leding	124	1,17
3.	Pompa	539	5,08
4.	Sumur	3.149	29,68
5.	Mata air	2.072	19,53
6.	Air Sungai/ Hujan/ Lainnya	4.475	42,18

Sumber : BPS Kab. Keerom dalam *Keerom dalam Angka 2007*

Tabel 11. Tempat Pembuangan Terakhir (Jamban) yang digunakan Rumahtangga, tahun 2006

No.	Tempat Pembuangan	Rumahtangga	Persentase (%)
1.	Tangki / SPAL	1.160	10,94
2.	Kolam	166	1,56
3.	Sungai	1.658	15,63
4.	Lubang Tanah	6.671	62,89
5.	Tanah Lapang/ Kebun	83	0,78
6.	Lainnya	870	8,20

Sumber : BPS Kab. Keerom dalam *Keerom dalam Angka 2007*

Berbagai angka di atas belum cukup untuk mengukur derajat kesehatan atau lebih dari pada itu, keadaan lingkungan. Dibutuhkan data kuantitatif dari tahun-tahun sebelum masuk perkebunan sawit hingga saat ini. Namun demikian, secara sekilas dapat diperhatikan data mengenai beberapa penyakit yang menonjol, juga data mengenai sumber air minum dan keadaan jamban.

Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan status lingkungan, dalam hal ini malaria, ISPA dan Diare menduduki peringkat tiga besar.

3.2. Kehidupan Ekonomi

3.2.1. Ekonomi pribumi

Wilayah Arso sampai dengan tahun 1980-an merupakan daerah yang sebagian besar didiami oleh masyarakat asli Arso. Mereka mendapatkan manfaat dari usahanya melalui pola hidup sebagai peramu. Dalam tatanan ekonomi tradisional, masyarakat asli Arso mengerjakan kebunnya sendiri; menebang

pohon, membersihkan, membakar, menanam, memelihara, termasuk berburu dan mencari ikan. Mereka bekerja mencari di dusun sejauh daerah tersebut menjadi milik marganya. Mereka tidak terikat dengan kredit terhadap suatu instansi, kontrak kerja dengan majikan, gaji bulanan dan jam kerja tertentu. Mereka dapat merencanakan suatu program kerja dan memutuskan sendiri kapan pekerjaan tersebut perlu dilaksanakan.

Masuknya perusahaan sawit (1982/1983) membawa hal baru dalam pola tatatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya sebagai peramu diperkenalkan dengan sistem upah, juga sistem kredit yang harus dibayarkan oleh petani setiap kali panen kelapa sawit. Mereka juga diperkenalkan dengan pola hubungan majikan dan bawahan, pola pembagian waktu kerja yang sebelumnya tidak mereka gunakan. Mereka juga diperkenalkan dengan pola penggajian berdasarkan pengetahuan atau tingkat pendidikan. Bagi masyarakat pribumi itu semua adalah perubahan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Pola ekonomi tradisional berubah ke pola ekonomi produktif.

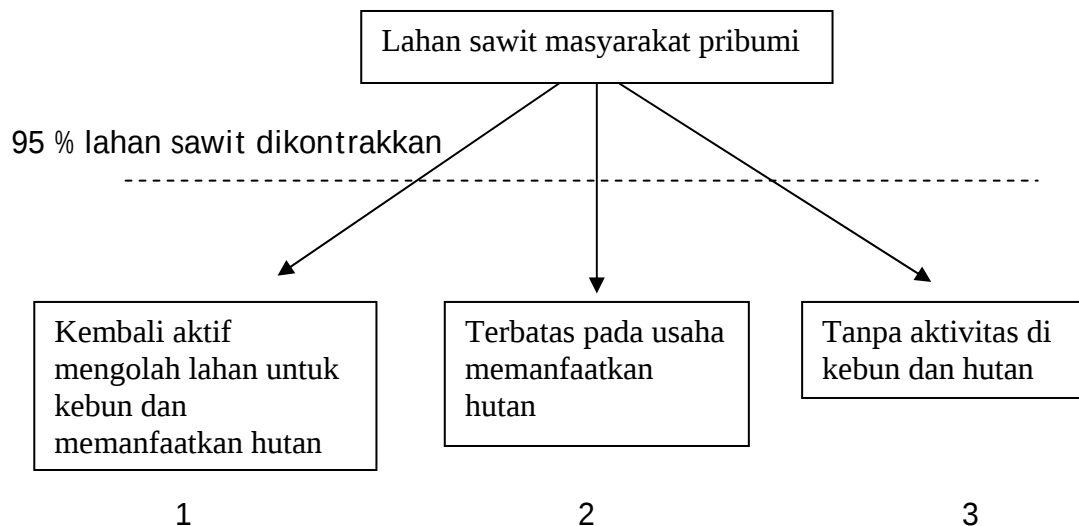
Orang-orang tua dari masyarakat pribumi yang terlibat dalam penerimaan kedatangan perkebunan sawit awalnya mengungkapkan bahwa kesejahteraan dari kelapa sawit sebagian besar akan dirasakan oleh anak dan cucu mereka dikemudian hari sedangkan orang-orang tua hanya merasakan sedikit saja keberhasilan dari perkebunan sawit. Namun ungkapan orang-orang tua tersebut rupanya kandas di tengah jalan. Keberhasilan ekonomi yang diharapkan saat ini dicapai ternyata justru sebaliknya yaitu membuat masyarakat semakin terjepit kehidupan ekonominya.

Pater John Jonga (1992) melaporkan, hampir semua orang menjadi bingung, cemas, ragu-ragu dan gelisah karena perubahan yang begitu cepat dan menyeluruh. Tidak sedikit orang yang mengalami "shock ekonomi," masa depan suram, putus asa. Arah hidup menjadi kabur karena tuntutan ekonomi yang luar biasa.

Penyadaran dalam diri masyarakat terhadap perubahan pola dari tradisional ke produktif kurang diperhatikan. Masyarakat tidak menyadari perubahan orientasi dalam melakukan kegiatan yang terkait erat dengan ekonomi mereka. Masyarakat terbawa arus perubahan. Bila hari ini mereka mendapatkan uang maka akan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan atau juga keinginan hatinya. Pola atau Kebiasaan untuk menyimpan uang atau memanfaatkannya untuk hal-hal yang memang dibutuhkan belum tertanam baik dalam tindakan mereka.

Saat ini sekitar 95 % masyarakat pribumi telah melepaskan lahannya untuk dikontrakkan. Mereka hanya memperoleh sekitar Rp 300.000,-/bulan.³⁰ Untuk apakah uang sebanyak itu saat ini? Untuk makan satu orang pun tidak cukup bila hanya menggantungkan diri dari hasil kontrakkan lahan sawit yang seluas 2 ha tersebut. Penduduk yang telah mengontrakkan lahan sawitnya kemudian mulai aktif melakukan aktivitas lain. Ada beberapa pola yang terjadi setelah mereka mengontrakkan lahannya:

³⁰ Besarnya nilai kontrak yang ditawarkan oleh pengontrak tergantung kepada beberapa hal seperti tahun tanam kelapa sawit, letaknya dari jalan (jauh/dekat), jumlah produksinya. Kontrak yang dilakukan oleh petani kadang dengan jangka waktu bulanan namun ada juga yang dibuat untuk jangka waktu tahunan.



Keterangan:

1. Mengontrakkan lahan sawit lalu membuka kebun dan kadang-kadang masih ke hutan mencari makanan (sayur, daging).
2. Mengontrakkan lahan sawit lalu kembali ke pola lama yaitu aktif berusaha mendapatkan makanan (sayur, daging, ikan) dari hutan.
3. Mengontrakkan sawit lalu sibuk dengan aktivitas yang berbeda seperti jualan pinang dan ojek atau hanya jalan tanpa tujuan. Mereka sudah tidak mau ke kebun dan hutan. Mereka ini umumnya tinggal saja di kampung atau sekitarnya. Tidak jarang terjadi bila merekalah yang kadang menjual lahan sawitnya karena sudah tidak lagi memiliki uang.

Beberapa alasan yang membuat masyarakat mengontrakkan lahan sawit terkait dampak perkebunan sawit terhadap ekonomi masyarakat adalah

- a. Pabrik rusak sehingga kapasitas olah rendah sekali sehingga banyak buah yang busuk di lahan tanpa diolah. Saat ini Pabrik Kelapa Sawit hanya mampu mengolah TBS sebanyak 14 Ton/jam.³¹
- b. Harga Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit dibeli di bawah harga standar. Harga TBS untuk petani sawit yang dibeli oleh perusahaan PTPN II Kebun Arso berkisar Rp. 900 – Rp. 1.000,- untuk setiap kg.³² Sedangkan harga TBS saat ini misalnya di Langkat-Sumatera Utara adalah Rp 1.675,- s.d. Rp 1.825,- per kg.³³
- c. Ongkos angkutan yang tinggi sehingga banyak petani yang tidak mampu membayarnya. Untuk saat ini harga sekitar Rp. 1.000.000,-³⁴
- d. Pungutan oleh perusahaan khususnya yang bekerja di pabrik. Bila tidak membayar maka tidak akan dilakukan penimbangan dan pembongkaran TBS dari truk.
- e. Alat timbang TBS yang sudah tidak tepat lagi. Masyarakat merasa tertipu dengan alat timbang milik perusahaan.

³¹ Lih. Lampiran 2. Surat No. II.ARS/X/04/I/2008

³² Di Riau pertengahan bulan Mei dilaporkan bahwa harga TBS dari petani sekitar Rp. 1.300,-

³³ Anonim. *Spekulasi Picu Harga CPO Anjlok: Harga TBS Petani Turun Lebih Awal*. Kompas, 21 Juni 2008.

³⁴ Ongkos angkutan TBS di Arso sudah kurang memperhatikan jarak lagi, sehingga jauh-dekat dikenakan tarif yang relatif sama.

- f. Sarana jalan produksi khususnya yang di petani plasma dibiarkan rusak saja tanpa ada upaya perbaikan dari perusahaan.
- g. Ketidakadilan dalam pengolahan TBS. Truk yang memuat TBS yang berasal dari kebun inti milik perusahaan bisa langsung masuk pabrik sedangkan truk yang memuat sawit milik masyarakat harus antri.
- h. Adanya pungutan oleh aparat keamanan di sekitar pabrik kepada truk-truk yang memuat TBS.

Dalam perkembangan terakhir tampak bahwa kehidupan masyarakat khususnya petani PIR-Trans semakin memprihatinkan kesejahteraannya. Bulan Februari 2008 tercatat di Afdeling I Kebun Arso ada 43 kk (26,5%) dari 162 kk menerima gaji sedangkan sisanya yaitu 119 kk (73,5%) tidak menerima gaji. Sementara di Afdeling II ada 48 kk (23%) dari 208 kk menerima gaji sedangkan sisanya 160 kk (77 %) tidak menerima gaji.³⁵

Persoalan penundaan pembayaran TBS juga pernah terjadi antara 16 Nopember 2004 sampai 31 Desember 2004. Saat itu perusahaan menunggak sebanyak Rp. 5.074.502.000,- (Lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) kepada karyawan sendiri, pihak III dan kepada petani di Kebun Arso.³⁶

Pada tanggal 19 Januari 2004 Direktur Utama PTPN II (Ir. H. Suwandi) juga menulis surat kepada Bapak Gubernur Propinsi Papua untuk mohon penangguhan upah minimum propinsi. Alasan yang diungkapkan adalah PTPN II Tanjung Morawa belum mampu membayar upah sesuai ketentuan upah minimum propinsi. Juga diungkapkan oleh perusahaan bahwa sejak tahun 2001-2003 PTPN-II mengalami kerugian.³⁷

Pada tahun 1994 PTPN II Kebun Arso melaporkan bahwa penghasilan bersih antara Januari-Agustus 1994 berkisar sekitar Rp. 198.135,- per kk/bulan. Pada saat itu jumlah petani plasma yang dilaporkan dikenakan pajak adalah 1207 kk (berdasarkan jumlah luasan areal tanam). Juga dilaporkan bahwa jumlah potongan untuk kredit dan pupuk yang sudah dibayarkan antara Januari-Agustus 1994 sebesar Rp. 976.051.923 dan yang masih harus dibayarkan atau ditanggung petani adalah Rp. 1.913.192.742,-.³⁸ Nilai kredit yang dibebankan kepada petani dengan tahun tanam 1983/1984 sampai dengan 1989/1990 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³⁵ Dihimpun dari laporan tanggal 15 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Bpk Damas Kebelen sebagai kepala kampung di PIR II dan Pdt. Edy Togodli sebagai Pengurus Forum Petani. Laporan tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.

³⁶ Lih. Lampiran 4. Surat No. II.AR/X/03/I/2005. Surat ini ditujukan kepada Bpk. Bupati Kabupaten Keerom menyangkut keterlambatan pembayaran pembelian TBS petani kelapa sawit.

³⁷ Lih. Lampiran 5. Surat No. II.O/X/18/I/2004. Surat ini ditujukan kepada Bpk. Gubernur Propinsi Papua menyangkut permohonan penangguhan upah minimum propinsi.

³⁸ Bdk. Laporan Singkat Pada Kunjungan Bapak Direksi PTP II Tanjung Morawa – Medan di Kebun Arso.

Tabel 12. Daftar Potongan Kredit Petani Sawit³⁹

Tahun tanam	Jumlah KK	Total Jumlah kredit (Rp)	Potongan kredit/kk (Rp)
1983/1984	250	709.429.528,-	2.837.718,1,-
1984/1985	200	584.532.155,-	2.922.660,8,-
1985/1986	300	847.129.415,-	2.823.764,7,-
1986/1987	50	148.433.770,-	2.968.675,4,-
1987/1988	157	275.810.752,-	1.756.756,4,-
1989/1990	250	323.909.046,-	1.295.636,2,-

Namun analisa di atas berbeda dengan keadaan lapangan. Beberapa petani dari PIR mengaku bahwa kredit yang dibebankan kepada kelompoknya sekitar Rp. 7.500.000,-/kk.⁴⁰ Nilai kredit tersebut dipotong setiap kali panen. Besarnya pemotongan adalah 30% dari pendapatan kotor petani setelah panen sawit. Setiap lahan sawit (kapling) kalau dirawat baik bisa menghasilkan 3-4 ton.

Berdasarkan pengakuan petani sawit di PIR, tahun 1998 para petani hanya memperoleh sekitar Rp. 300.000,- setiap kali panen. Angka tersebut sudah termasuk pembayaran kredit yang dilakukan langsung ke Bank Exim (sekarang Bank Mandiri). Pengaturan pembayaran dilakukan oleh perusahaan. Jadi kelompok petani di PIR II telah melunasi kredit sekitar tahun 1998/1999. Namun secara umum tidak semua petani bersedia melunasi kreditnya, khususnya petani pribumi yang berada di desa-desa dengan mayoritas penduduk pribumi dengan alasan bahwa tanah ini adalah milik mereka lalu mengapa mesti melunasi kredit yang tidak dilakukan oleh mereka sendiri. Ketidاكلunasan pembayaran kredit membuat ada diantara petani yang belum memperoleh sertifikat tanahnya. Sertifikat bisa dikembalikan kepada petani bila kreditnya di bank telah lunas.

Tahun 2006 PTPN II Arso mengeluarkan laporan luas panen, produksi kelapa sawit, dll dari empat lokasi (plasma, inti, KKPA dan BIP) yang termuat dalam Keerom dalam Angka 2007. Berdasarkan data tersebut dicari pendapatan rata-rata per petani sawit tahun 2006 (khususnya untuk petani PIR). Untuk jelasnya disajikan dalam tabel di berikut ini.

³⁹ Dianalisa berdasarkan data pendapatan dan angsuran kredit petani periode Januari 1994 s/d Agustus 1994, bdk Laporan Singkat Pada Kunjungan Bapak Direksi PTP II Tanjung Morawa – Medan di Kebun Arso.

⁴⁰ Berdasarkan wawancara dengan petani sawit di PIR II

Tabel 13. Pendapatan masyarakat PIR berdasarkan produksinya pada kebun plasma tahun 2006

Bulan	Luas (ha)	Produksi (kg) ⁴¹	Rata2/ha (kg)	Rata2 Pendapatan (Rp) ⁴²
Januari	3.600	4.067.180	1.129,77	903.817,78
Februari	3.600	3.976.420	1.104,56	883.648,89
Maret	3.600	3.892.930	1.081,37	865.095,56
April	3.600	2.820.820	7.83,56	626.848,89
Mei	3.600	4.824.930	1.340,26	1072.206,67
Juni	3.600	4.109.920	1.141,64	913.315,56
Juli	3.600	3.843.650	1.067,68	854.144,44
Agustus	3.600	3.211.410	892,058	713.646,67
September	3.600	3.411.370	947,60	758.082,22
Oktober	3.600	2.967.510	824,31	659.446,67
Nopember	3.600	3.379.990	938,89	751.108,89
Desember	3.600	2.726.160	757,27	605.813,33
Jumlah	43.200	43.232.290	1.000,75	800.597,96

Berdasarkan tabel tersebut maka petani PIR yang berjumlah 1800 kk (data ini diambil berdasarkan data tahun 1994 yang dikeluarkan oleh PTPN II) akan mendapatkan Rp. 1.601.196,- (rata2 pendapatan/ha x 2 ha karena setiap kk memperoleh 2 ha lahan sawit). Dari jumlah tersebut bila dipotong dengan ongkos angkutan (Rp 700.000,-), ongkos buruh untuk turunkan buah dan pikul (Rp 400.000,-) maka sisa bersih yang bisa diterima petani sekitar Rp. 501.196,-/kk/bln. Pendapatan/bln yang kecil -dengan mengabaikan tenaga sendiri dalam menjaga lahan sawit- inilah yang membuat banyak lahan sawit akhirnya dikontrakkan oleh pemiliknya karena perbedaan antara mengontrakkan dan bekerja langsung hanya sekitar Rp. 200.000,-. Jadi sebagian besar petani sawit memilih mengontrakkan lahannya kepada orang lain dan akan memperoleh sekitar Rp. 300.000,-/bln daripada mengolah sendiri dan hanya mendapatkan sekitar Rp. 500.000,-/bln.

3.1.2 Ekonomi non pribumi

Usaha perkebunan sawit di Arso ternyata tidak hanya memberikan pengaruh kepada masyarakat asli tapi juga non pribumi. Berbeda dengan masyarakat pribumi masyarakat non pribumi yang datang ke Arso sudah memiliki pengetahuan untuk bertani secara produktif. Pengalaman yang sudah dimiliki di daerah asalnya bahwa bertani membutuhkan keseriusan dalam mengelola lahannya: pembersihan, penanaman, pemeliharaan tanaman sampai

⁴¹ Menurut sumber data (Keerom Dalam Angka 2007), satuan produksi yang digunakan sebagai ukuran adalah ton dan bukan kg. Namun angka ini tidak realistis karena bila dirata-rata per ha maka hasilnya menjadi sangat besar, misalnya untuk Januari 2006 produksinya 4.067.180 ton, bila dibuat rata2/ha dapat mencapai 1.130 ton (1.130.000 kg). Apakah produksi/ha pernah mencapai angka tersebut? Belum. Untuk itu data produksi diubah ke kg dengan demikian diperoleh rata-rata/ha yang lebih realistis dan sesuai dengan keadaan lapangan di Arso seperti nampak dalam tabel di atas.

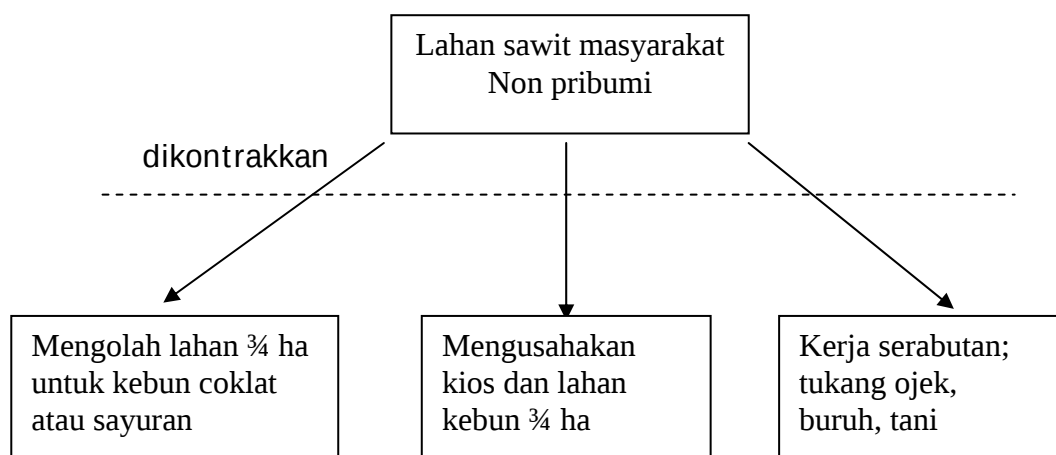
⁴² Besarnya pendapatan diperoleh dengan cara: mengalikan rata-rata/ha (kg) x Rp 800,-

panen, tidak berbeda dengan pengalaman bekerja di lahan perkebunan kelapa sawit di Arso. Jika ada perbedaan, maka hanya dalam jenis tanaman dan pola kerjanya namun secara umum masyarakat non pribumi yang umumnya berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, NTB, NTT, serta Papua (dari luar Arso seperti Wamena) sudah cukup mampu dalam mengusahakan lahannya.

Sekitar tahun 2001/2002, sejak pabrik sawit mulai mengalami kemacetan dalam pengoperasian maka para sopir truck memungut biaya lebih banyak dari petani dalam pengangkutan TBS. Sopir merasa rugi dengan tarif lama jika harus parkir sehari-hari di pabrik sebelum membongkar muatan sementara majikan menuntut setoran, maka petani dituntut harus menanggung biaya parkir sehari-hari tersebut ditambah uang makan dan rokok sopir.

Petani awalnya masih sanggup untuk membayar biaya pengangkutan yang bisa mencapai angka Rp 1.000.000,- namun setelah masalah kemacetan pabrik tidak segera diselesaikan selama bertahun-tahun akhirnya para petani mengkontrakkan lahannya karena modal yang dimiliki mulai menipis. Harga yang dibayarkan oleh pengontrak sangat tergantung dari letak kebun terhadap jalan dan tahun tanam sawit dan produksi sawit dari lahan tersebut.

Kehidupan masyarakat non pribumi setelah mengkontrakkan lahannya bisa bermacam-macam. Peralihan ke jenis usaha lain dilakukan karena mereka perlu mempertahankan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Ada beberapa pola yang muncul setelah mereka mengkontrakkan lahan sawitnya. Peralihan pola tersebut dapat dilihat di bawah ini



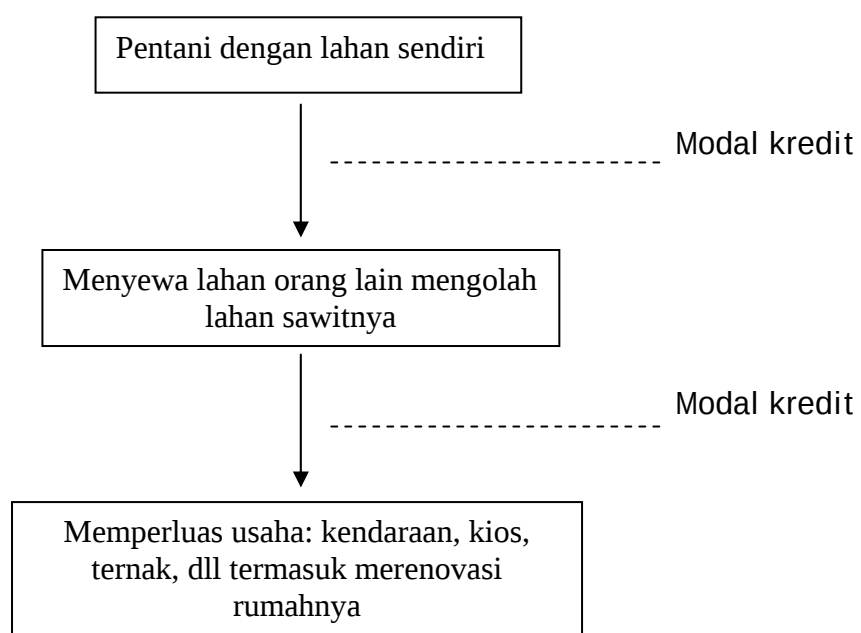
Masyarakat non pribumi yang datang ke Arso khususnya di lokasi PIR memperoleh lahan seluas 3 ha (2 ha untuk lahan sawit, $\frac{3}{4}$ untuk lahan tanaman pangan dan $\frac{1}{4}$ untuk rumah dan pekarangan) dari pemerintah termasuk sertifikat tanah. Setelah lahan kebun kelapa sawit (2 ha) dikontrakkan maka aktivitas mereka terbatas pada areal 1 ha. Dari hasil wawancara ada penduduk yang sudah menjual seluruh lahannya dan kembali ke kampung halamannya.

3.1.3 Petani yang berhasil

Para petani sawit yang datang ke Arso bekerja di perkebunan sawit bertujuan untuk mencari sesuap nasi. Modal mereka adalah semangat dan pengalaman (pengetahuan) bertani. Namun kemudian dalam perkembangannya

terbentuk pola petani tertentu seperti petani penyewa. Mereka ini boleh disebut sukses untuk maju dalam ekonomi dibanding rekan-rekan sesama petani lainnya.

Petani yang sukses di perkebunan sawit, selain mereka memiliki lahan sendiri juga menyewa lahan-lahan dari petani lainnya yang sudah tidak sanggup mengerjakan lahannya lagi karena keterbatasan modal. Petani dalam kelompok ini kadang bukan hanya menyewa satu lahan namun bisa lebih dari 2 lahan (4 ha). Mereka juga memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan seperti truk untuk membantu usahanya mengangkut hasil panen kebun sawit. Mereka juga ada yang membuka usaha kios. Kelompok ini juga mendapat kepercayaan dari bank karena memiliki sertifikat lahan sawit dan kemampuannya mengembalikan cicilan kredit.



3.2 Kehidupan Sosial dan Budaya

3.2.1 Pandangan Orang Arso⁴³

Orang Arso menyadari bahwa tanah mereka tidak ada yang menjadikannya sebagai milik pribadi. Mereka menghayatinya sebagai hak bersama dalam satu klen. Mereka sungguh-sungguh tahu di mana tanah yang merupakan hak ulayatnya. Mereka pun tahu di mana batas-batasnya.

Tanah yang merupakan hak ulayat dalam satu klen merupakan tumpuan hidup dari klen tersebut. Di tanah yang menjadi hak ulayatnya itu ia dapat bergerak dengan leluasa untuk mencari makan seperti menokok sagu, mencari kayu atau mencari sayur, berburu atau istirahat sekadar mencari ketenangan. Di sanalah letaknya bahwa tanah menjadi jaminan yang tak ternilai bagi kehidupannya. Di sanalah mereka menemukan keberadaannya sebagai manusia yang bebas dan leluasa untuk mencari makan.

⁴³ Wilhelmus Sinawil. *Ekosistem Menurut Orang Arso*. Kabar Dari Kampung (KdK) No. 61/Th. XI, Agustus 1993.

Di tanah yang menjadi hak ulayatnya tumbuh aneka kekayaan hutan yang melimpah seperti rotan, kayu besi, matoa dan berbagai jenis kayu lainnya. Hutan bagi orang Arso punya nilai lebih karena hutan sumber kebudayaan yang mampu memberi kehidupan bagi pemiliknya. Hutan memberikan berbagai kelimpahan kebutuhan manusia seperti daging, sagu, sumber obat-obatan dan sarana bangunan.

Tanda kebersatuan manusia dengan alamnya terlihat dalam perhiasan yang mereka gunakan dalam pesta adat. Aneka macam perhiasan seperti bulu burung, daun-daun, cat-cat yang diambil dari tanah atau dari tumbuhan tertentu. Semua itu mencirikan bahwa masyarakat asli Arso amat dekat dengan lingkungan alam dan bersatu dengannya.

3.2.2 Masyarakat Transisi

Sebagian besar masyarakat asli Arso saat ini merupakan masyarakat transisi yakni dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri dan komunikasi modern. Dalam pengaruh dan perubahan budaya tersebut pada umumnya segi material lebih dominan daripada segi spiritual. Segi material kebudayaan seperti hasil-hasil teknologi sangat mudah diserap, sedangkan segi spiritual seperti nilai-nilai yang ada dibalik produk tersebut sulit diserap. Makna dan nilai mendalam dari kebudayaan yang sekarang sedang mempengaruhi tidak diserap, sedangkan makna dan nilai budaya tradisional sudah memudar atau semakin menghilang. Dengan demikian dalam budaya transisi itu terjadi pengdangkalan makna atau krisis nilai. Dalam situasi semacam itu pilihan-pilihan masyarakat lebih mudah jatuh kepada nilai material.⁴⁴

Di Arso juga hadir berbagai macam perkembangan budaya masyarakat. Arso sendiri sejak tahun 1982/1983 tidak hanya terdiri dari masyarakat pribumi saja tapi juga hadir penduduk dari daerah lain seperti Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua (non Arso). Mereka datang karena program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah.

Perkembangan jumlah penduduk juga berperan penting dalam perkembangan sosial budaya masyarakat Arso. Saat ini di Kabupaten Kerom secara keseluruhan jumlah penduduk Papua adalah 17.947 sedangkan non Papua adalah 24.938.⁴⁵ Berdasarkan data tersebut maka tampak jelas jumlah penduduk Non Papua lebih besar dari Papua.

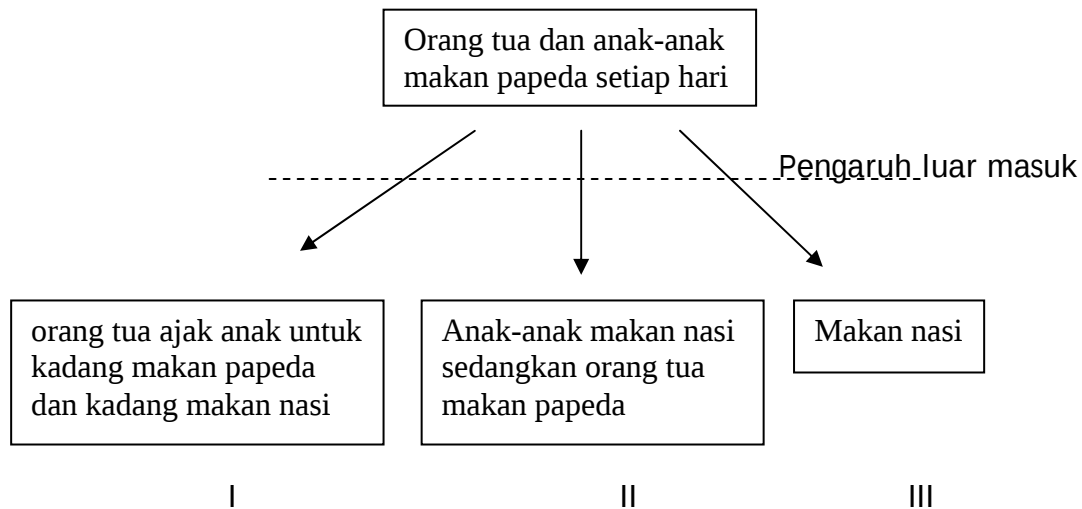
Pergeseran pola hidup yang terjadi pada masyarakat terkait dengan hadirnya kelapa sawit dapat dilihat pada beberapa hal berikut ini:

3.2.2.1 Pola makan

Masyarakat pribumi Arso awalnya untuk kebutuhan sehari-hari mereka makan makanan pokok berupa papeda namun kemudian bergeser. Pergeseran tersebut melalui beberapa tahapan seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

⁴⁴J.B. Banawiratma. *Iman, Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1991. hal 48.

⁴⁵ Berdasarkan data Januari 2008 yang belum diterbitkan oleh BPS.



Pada gambar di atas, kelompok pertama masih mengajak anaknya untuk makan papeda dan kadang makan nasi. kelompok ini terdiri dari petani yang masih aktif mengusahakan (mengolah) sagu di hutan. Jumlah petani dalam kelompok ini sudah tidak banyak. Dalam kehidupan mereka sehari-hari anak-anaknya tidak menolak untuk makan papeda. Kelompok kedua adalah kelompok yang orang tuanya sudah tidak berdaya lagi mengajak anaknya makan papeda. Bila ada papeda di meja maka anak-anak akan meminta orang tuanya untuk memasak beras sehingga mereka bisa makan nasi sedangkan papeda dimakan oleh orang tua. Kelompok ketiga adalah kelompok yang sudah tidak menyediakan papeda sebagai hidangan untuk dimakan baik oleh orang tua maupun anak-anak. Mereka bisa makan papeda tapi bukan merupakan menu utama di rumah.

3.2.2.2 Pola pertanian

Masyarakat pribumi Arso mengolah lahannya dalam bidang pertanian tradisional melalui kegiatan membuka kebun, menanam, memelihara sampai panen. Semua proses dilakukan secara sederhana demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jenis-jenis tanaman yang dikembangkan seperti pisang, keladi, singkong juga pinang. Luasan dari kebun yang dikelola masyarakat asli biasanya terbatas saja (tidak sampai 0,5 ha). Mereka mengembangkan pertanian tanpa menggunakan pupuk kimia atau memilih untuk menanam jenis tanaman yang unggul. Dengan demikian maka pertanian yang dikembangkan adalah model pertanian yang ramah lingkungan.

Wilayah baru yang akan dipilih sebagai lokasi bercocok tanam perlu diperhatikan betul-betul. Syarat penting adalah tanah yang akan digunakan untuk lahan pertanian tersebut jangan sampai masuk dalam hak ulayat dari marga lain. Bila sampai melanggar maka petani tersebut akan mendapat sanksi. Di hutan walaupun tidak ada tanda-tanda batas wilayah masyarakat sudah tahu batas-batas wilayahnya secara umum. Lahan yang mau diolah biasanya ditebang pohon-pohonnya termasuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di bawahnya dibabat kemudian dibiarkan beberapa hari. Jika sudah kering maka kayu-kayu tersebut dikumpul lalu dibakar. Bila masih ada yang belum terbakar maka dibiarkan lagi beberapa hari sampai setelah kering kemudian dibakar. Abu-abu hasil bakaran

kadang dimanfaatkan tapi biasanya dibiarkan saja. Lahan yang sudah nampak bersih berarti sudah siap untuk ditanami. Jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman yang biasanya ada di sekitar mereka bukan bibit hasil beli di toko. Umumnya tanaman yang dipilih untuk ditanam adalah tanaman-tanaman yang bisa langsung dikonsumsi oleh keluarga seperti pisang, keladi, singkong. Tanaman-tanaman tersebut tidak membutuhkan aturan khusus dalam menanamnya dan bisa dilakukan siapa saja termasuk juga oleh anak-anak mereka. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan lahan dilakukan secara sederhana saja. Rumput-rumputan pengganggu dicabut atau dibabat lalu dibuang ke pinggir kebun kemudian bila kering maka dibakar. Pekerjaan ini dilakukan sesekali sampai menunggu masa panen tiba. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan tangan kosong saja atau dengan bantuan peralatan seperti parang dan sekop.

Dalam keseluruhan proses pekerjaan mulai dari pemilihan lokasi kebun sampai dengan pemanenan dilakukan masyarakat tanpa terikat pada waktu. Maksudnya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dalam kebebasan. Bila ada kegiatan di kampung seperti pertemuan, cuaca yang kurang baik dan pesta adat maka pekerjaan di ladang bisa ditinggalkan. Jadi tujuan utama dalam bertani adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menyesuaikan diri pada keadaan sosial di mana mereka berada. Setelah semua proses berjalan dan sudah beberapa kali panen di satu kebun maka akan dipikirkan untuk pindah ke lokasi lain. Kesuburan tanah menjadi sangat penting sebagai salah satu alasan berpindah lokasi tempat bercocok tanam.

Masuknya perkebunan kelapa sawit bisa dipandang memiliki cara yang berbeda dengan pengelolaan kebun yang sudah dilakukan oleh petani asli Arso selama turun-temurun. Dalam mengelola kebun sawit para petani dituntut untuk serius memperhatikan kebun sawitnya. Ada beberapa hal yang oleh masyarakat dilihat sebagai cara baru:

- Pembukaan lahan sawit dilakukan oleh alat-alat modern seperti chain-saw untuk menebang pohon.
- Lahan yang disiapkan untuk penanaman sawit dalam areal yang luas sekali (sekitar 2 ha untuk 1 kk).
- Penanaman kelapa sawit dilakukan oleh masyarakat dan dibayar oleh perusahaan melalui mandor.
- Kebersihan kebun perlu diperhatikan karena merupakan salah satu kunci keberhasilan produksi. Kebun yang bersih bisa berakibat kepada jumlah produksi.
- Petani sawit diharapkan untuk memberi pupuk kepada tanaman sawit. Pemupukan dilakukan karena kesuburan tanaman bergantung kepada nutrisi yang disediakan. Maka pemupukan yang baik juga berakibat positif kepada produksi sawit yang baik.
- Pemanenan sawit di Arso dilakukan setelah pabrik dibuka tahun 1992.⁴⁶ Untuk memanen sawit dibutuhkan peralatan yang khusus. Alat ini semacam tombak namun dengan ujung yang lebih lebar. Bila pohon sawit masih rendah maka pemanenan mudah dilakukan namun bila tanaman makin tinggi maka semakin sulit dilakukan.

⁴⁶ PTP II Kebun Arso Irian Jaya. *Op.cit.* Hal 3.

- Pengolahan sawit menjadi minyak membutuhkan peralatan mesin yang berukuran besar dan berada di dalam wilayah pabrik yang tidak bisa dengan bebas dikunjungi oleh masyarakat.

Tidak dapat dihindari bahwa sistem pengolahan lahan pertanian di perkebunan sawit membawa perubahan kepada pola pertanian masyarakat. Beberapa hal yang bisa dilihat seperti:

- Jenis tanaman yang diusahakan untuk ditanam menjadi sejenis (monokultur). Sebelumnya masyarakat memilih sawit dalam satu lahan bisa menanam paling kurang dua jenis tanaman tapi dengan masuknya perkebunan sawit hanya diperbolehkan menanam satu jenis.
- Kelapa sawit yang ditanam bukan merupakan tanaman yang setelah panen bisa langsung dikonsumsi (dimakan). Jenis tanaman demikian berbeda dengan yang biasa dilakukan masyarakat yaitu menanam jenis tanaman yang biasa dikonsumsi.
- Luasan untuk pembersihan lahan dan penanaman kelapa sawit dilakukan dalam areal sekitar 2 ha/kk. Sementara masyarakat biasanya membersihkan dan menanam tanaman hanya pada areal yang terbatas sekali (kurang dari 1 ha).
- Proses pemanenan kelapa sawit merupakan pekerjaan berat karena membutuhkan tenaga yang kuat artinya hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Sementara untuk masyarakat pemanenan hasil kebun biasa dilakukan juga oleh anak-anak.
- Untuk memperoleh hasil yang baik perlu pemupukan dan pembersihan di lahan kelapa sawit. Sementara untuk masyarakat asli sistem pemupukan kurang dikenal.
- Masa panen kelapa sawit sampai bertahun-tahun sementara untuk berkebun hanya membutuhkan waktu kurang dari satu tahun.
- Untuk panen dan pengangkutan hasil panen kelapa sawit membutuhkan tenaga yang besar yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa sedangkan pengangkutan hasil kebun bisa dilakukan juga oleh anak-anak.
- Pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) ke pabrik dilakukan dengan truck sedangkan pengangkutan hasil kebun hanya dengan berjalan kaki.
- Pengangkutan TBS ke pabrik membutuhkan biaya yang besar sedangkan pengangkutan hasil kebun tidak membutuhkan biaya.
- Transparansi berat (tonase) dan harga TBS antara petani dan perusahaan tidak dilakukan secara terbuka sedangkan dalam transaksi hasil kebun dapat dilakukan tawar-menawar antara petani dan pedagang.

Sekitar tahun 2002 masyarakat pribumi Arso mulai mengontrakkan lahan sawitnya yang seluas 2 ha. Bahkan sampai saat ini (2008) bisa disimpulkan bahwa masyarakat asli Arso sudah **tidak mengolah lahan sawitnya** lagi secara aktif tapi mengontrakannya kepada pihak lain bahkan ada juga yang mulai menjual lahannya secara sembunyi-sembunyi.

Masyarakat pribumi mengeluh karena beratnya pekerjaan sebagai petani sawit. Perkebunan sawit bukan merupakan bagian dari cara bertani mereka. Perkebunan sawit tidak memberikan mereka makanan tapi membuat mereka sakit bahkan ada yang sampai meninggal karena tertimpa buah sawit. Masyarakat sudah trauma lagi untuk mau mengembangkan sawit.

Usia duapuluh lima tahun bagi perkebunan sawit adalah masa-masa di mana perlu disiapkan lagi proses peremajaan sawit. Peremajaan perlu dilakukan untuk mengganti tanaman-tanaman tua yang sudah hampir tidak produktif lagi. Namun masyarakat asli sudah tidak mau lagi meremajakan sawitnya. Perkebunan sawit bukan merupakan bagian dari hidup mereka di masa yang akan datang. Mereka sudah bertahun-tahun mencoba bertahan dan merasa gagal dan kegagalan tersebut tidak mau diulangi lagi. Masyarakat merasa sudah tertipu dengan memilih sawit. Sawit yang diharapkan akan membawa kesejahteraan masyarakat justru membawa petaka.

3.2.2.4 Usaha ke masa depan

Salah satu yang diharapkan dari masyarakat untuk pengembangan pertanian di masa yang akan datang adalah mengusahakan kebun untuk tanaman kakao (coklat). Alasan yang dikemukakan adalah pekerjaan menanam dan memelihara coklat tidak membutuhkan energi yang besar, biaya, juga dapat dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa tapi juga oleh anak-anak, ada transparansi berat kakao (coklat) yang ditimbang dan juga ada tawar menawar harga antara petani dan pedagang.

Pengetahuan masyarakat untuk menanam, memelihara dan memanen kakao juga sudah mereka peroleh dari tenaga PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) Pertanian yang kadang membantu mereka dalam transfer pengetahuan. Informasi berupa tehnik-tehnik bertani kakao yang diberikan dirasa sanggup untuk dilaksanakan.

Sampai saat ini sudah beberapa kampung di Arso yang menanam kakao bahkan ada yang telah panen dan menikmati hasil dari penjualan buahnya. Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang sudah lebih awal memulai menanam kakao tersebut maka banyak masyarakat tertarik untuk menanam kakao. Kakao sedang menjadi primadona masyarakat pribumi menggantikan kebun sawit.

3.4 Hak Ulayat

Orang Papua jika ditilik dari sisi sebagai komunitas tradisional sebenarnya mereka tidak memiliki konsep jual beli tanah. Apalagi jual beli tanah yang sebenarnya tidak ada karena hak tanah dalam alam pikiran manusia Papua lebih merupakan hak milik bersama dalam suatu klen. Dalam hal ini berarti tanah merupakan hak ulayat daripada milik individu/pribadi karena manusia Papua secara umum lebih menekankan pola hidup kekerabatan yang terikat secara kuat satu sama lain.⁴⁷



Pertemuan tanggal 24 Mei 2008 di Kampung Pir V Yamara dengan agenda membahas persoalan kepemilikan tanah yang telah digunakan oleh PTPN II Kebun Arso sebagai areal perkebunan inti seluas 1310 ha merupakan salah satu contoh sikap masyarakat terhadap tanahnya.⁴⁸ Klaim terhadap tanah ulayat tersebut oleh keret Fatagur merupakan klaim bersama dan bukan individu.

⁴⁷ Wilhelmus Sinawil. *Ekosistem Menurut Orang Arso*. KdK No. 61/Th. XI, Agustus 1993.

⁴⁸ Surat Pernyataan yang dibuat tahun 1992 oleh lembaga Masyarakat Adat Arso dinyatakan tidak sah dan perlu ditinjau kembali. Surat pelepasan hak ulayat yang menjadi sengketa dapat dilihat dalam lampiran 6.

Klaim yang diajukan juga tidak memuat tuntutan ganti rugi namun pengakuan bahwa tanah tersebut milik Fatagur.

Manager PTPN II Kebun Arso (Bpk J. Worengga) pada pertemuan tanggal 24 Mei 2008 di Kampung PIR V Yamara mengungkapkan bahwa kontrak PTPN II Kebun Arso adalah 60 tahun. Pernyataan tersebut berarti hak masyarakat terhadap tanah ulayatnya baru dapat dikembalikan oleh perusahaan sekitar tahun 2042 (bila didasarkan masuknya PTPN II di Arso tahun 1982). Pernyataan pemakaian tanah oleh PTPN II Kebun Arso selama 60 tahun dapat mengakibatkan dampak yang semakin berat dalam pelbagai aspek seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, hak ulayat dan kondisi keamanan bagi masyarakat.

Posisi masyarakat adat sangat lemah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan hutan oleh pihak swasta menuntut masyarakat adat harus membuat surat pelepasan hak atas tanah adat atau hak ulayat. Hal itu berarti masyarakat memutuskan ikatan hukum atas tanah ulayatnya dan menyerahkannya kepada pemerintah.⁴⁹

Di Arso 9 Juli 1981 terjadi pelepasan hak atas tanah adat/hak ulayat seluas 18.000 ha; 12.000 Ha di Workwana dan 6.000 Ha di Skanto.⁵⁰ Pada tanggal yang sama (9 Juli 1981) Panitia Pembebasan Tanah Daerah TK II Jayapura mengeluarkan keputusan bahwa tanah seluas 18.000 Ha adalah tanah yang akan diserahkan oleh pemiliknya kepada Negara dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.⁵¹ Pada tanggal 17 September 1981 melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 59/KPTS/BUP-JP/1981 diputuskan bahwa tanah seluas 18.000 ha (bukan 28.000 ha seperti ada dalam surat keputusan tersebut) akan digunakan untuk lokasi transmigrasi.⁵² Namun pada tanggal 4 Mei 1983 melalui SK Bupati Daerah Tingkat II Jayapura No. 31/KPTS/BUP-JP/1983 terjadi perubahan peruntukan tanah. Dalam SK Bupati tersebut diputuskan bahwa areal seluas 12.000 ha di Workwana akan digunakan untuk Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet (sebelumnya areal ini ditetapkan untuk Proyek Transmigrasi).⁵³

Konflik dari masyarakat atas tanah ulayatnya mulai muncul sejak keluarnya SK Bupati No 31/KPTS/BUP-JP/1983. Melalui surat tersebut masyarakat merasa ditipu karena perubahan lokasi tersebut tidak sesuai dengan pelepasan tanah adat yang sudah disepakati sebelumnya. Berikut untuk lebih jelasnya akan disajikan informasi seputar pelepasan tanah dan konflik yang ditimbulkannya.

Tabel 14. Gambaran umum seputar pelepasan tanah ulayat di Arso, Kab. Keerom

Waktu	Uraian
9 Juli 1981	Dikeluarkannya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat seluas 18.000 ha oleh tujuh orang yang mempunyai hak atas tanah ulayat yang terletak di Skanto Desa Arso Kota dan di Desa Workwana.
9 Juli 1981	Dikeluarkannya keputusan panitia pembebasan tanah daerah tingkat II

⁴⁹ Tim Sintese. *Sintese Kapasitas Pembangunan Papua*. Jayapura, Mei 2005. Hal 81.

⁵⁰ Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat seluas 18.000 ha dapat dilihat dalam lampiran 7.

⁵¹ Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Jayapura terlampir 8.

⁵² Keputusan tentang Pelepasan dan Penunjukan Tanah Untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura dapat dilihat pada lampiran 9.

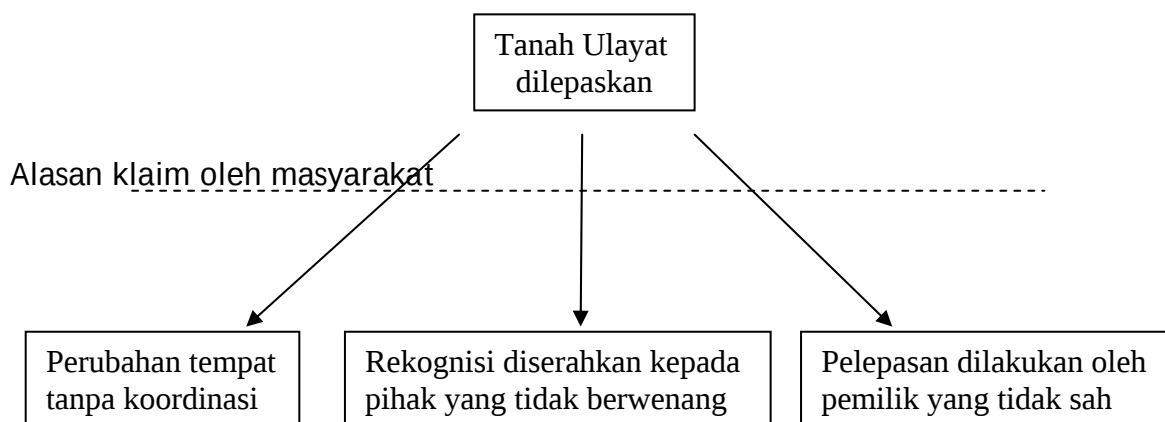
⁵³ Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura tentang Perubahan Lokasi Pencadangan Tanah Untuk Proyek Transmigrasi di Kecamatan Arso Daerah Tingkat II Jayapura dapat dilihat pada lampiran 10.

	Jayapura No 18/KPTS/Pan/1981.
17 September 1981	Dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No 59/KPTS/BUP-JP/1981 tentang pelepasan dan penunjukan tanah untuk keperluan proyek transmigrasi Arso-Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura daerah tingkat II Jayapura.
19 Oktober 1982	Dikeluarkannya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat seluas 50.000 ha oleh duapuluh empat orang yang mempunyai hak atas tanah ulayat yang terletak di Desa Arso Kota dan di Desa Workwana. ⁵⁴
23 Maret 1983	Dikeluarkannya keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Irian Jaya No. 53/GIJ/1983 tentang penetapan lokasi/areal transmigrasi di Kecamatan Arso Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
4 Mei 1983	Dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No 31/KPTS/BUP-JP/1983 tentang perubahan lokasi pencadangan tanah untuk proyek transmigrasi di Kecamatan Arso daerah tingkat II Jayapura. (Dalam SK ini muncul untuk pertama kali penetapan lahan seluas 12.000 ha di Workwana untuk proyek perkebunan sawit dan karet).
1983	Masyarakat asli mulai bereaksi karena merasa ditipu oleh pemerintah perihal perubahan lokasi untuk transmigrasi sehingga batas-batas tanah tidak sesuai lagi dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat tahun 1981.
15 Maret 1986	Panitia pembebasan tanah mengeluarkan SK No 06/KPTS-PAN/III/86 yang isinya penetapan pemberian recognisi atas tanah seluas 7.500 ha di Desa Arso Kota dan Desa Kwimi sebesar Rp. 90.000.000,- (diserahkan dalam bentuk barang).
15 Maret 1986	Panitia pembebasan tanah mengeluarkan SK No 06/KPTS-PAN/III/86 yang isinya penetapan pemberian recognisi atas tanah seluas 3.600 ha di Desa Arso Kota sebesar Rp. 10.000.000,- (diserahkan dalam bentuk barang).
15 Maret 1986	Pertemuan untuk menerima ganti rugi di Arso Kota. Saat itu masyarakat menolak pemindahan peruntukan lahan seluas 12.000 ha dari Workwana ke Arso Kota karena tidak didasarkan musyawarah. Recognisi untuk lahan seluas 12.000.000 ha untuk masyarakat Arso dan Kwimi dengan: - Truk 2 buah - Mobil Kijang Toyota dengan bak terbuka: 5 buah - Mesin jahit : 4 buah - Chain-saw : 2 buah
15 April 1988	Surat kepada Bapak Gubernur dari ondoafi dan tokoh-tokoh masyarakat Arso perihal tuntutan ganti rugi tanah dan tanaman budidaya hak ulayat seluas 50.000 ha untuk pengembangan proyek PIR di Kecamatan Arso.
Desember 1992	Dikeluarkannya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat

⁵⁴ Surat pernyataan pelepasan tanah adat seluas 50.000 ha dapat dilihat dalam lampiran 11.

	seluas 1.310 ha untuk areal kebun inti sawit PTP II.
19 April 1997	Sebuah surat kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura yang berasal dari masyarakat Arso yang isinya sepakat untuk mengambil uang penghargaan sebesar Rp. 50.000.000,- dari Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura.
17 Mei 1997	Uang Rp 54.000.000 diambil dari bendahara setwilda tingkat II Jayapura untuk pembayaran biaya rekognisi untuk masyarakat Arso atas penyerahan tanah adat untuk lokasi PIR.
24 Mei 1997	Sebuah surat dikirim kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura yang isinya masyarakat adat Arso menolak penyerahan uang Rp 50.000.000 sebagai ganti rugi tanah PIR Arso seluas 50.000 ha. Dalam surat tersebut juga disertakan alasan-alasan penolakan uang tersebut. ⁵⁵
29 November 1997	Dilakukan pemotongan uang sebesar Rp 20.000,-/petani sampai berjumlah Rp. 18.000.000 untuk peremajaan tanaman sawit. ⁵⁶
6 Januari 1998	Surat kepada Bupati Kepala Daerah Tk II Jayapura dari Yuskondur dan Ketua Marga/Keret yang salah satu isinya menolak keras dan tidak mengakui SK Bupati No 31/KPTS/Bup-JP/1983 tanggal 4 Mei 1983.
Februari 1998	Pertemuan di balai desa bersama camat Arso yang isinya masyarakat menolak pemotongan hasil sawit. ⁵⁷
24 Mei 2008	Pertemuan di balai desa PIR V oleh masyarakat adat yang isinya menolak surat pelepasan tanah 1.310 ha karena pelepasan tanah tersebut tidak melibatkan pemilik tanah yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa masalah hak ulayat bukan merupakan persoalan yang mudah penyelesaian. Paling kurang ada tiga kali pelepasan tanah adat atau ulayat yang dilakukan oleh masyarakat adat di Arso (12.000 ha, 50.000 ha dan 1.310 ha) dengan total luasan mencapai 63.310 ha. Semua lahan tersebut dilepas dalam kurun waktu sebelas tahun (1981-1992). Dari ketiga surat pelepasan tersebut tidak satupun yang secara bulat bisa bebas dari klaim. Alasan klaim terhadap tanah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



⁵⁵ Isi surat penolakan tersebut dapat dilihat pada lampiran 12.

⁵⁶ Berdasarkan laporan dari Pak Servo T dan Mikael W

⁵⁷ Berdasarkan laporan dari Pak Servo T dan Mikael W

Surat pelepasan tanah adat sangat diperlukan untuk pengembangan suatu program yang membutuhkan lahan namun hal itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Semua pihak perlu dilibatkan khususnya pemilik tanah ulayat. Selain itu perlu setia kepada kesepakatan yang telah dibuat.

3.5 Situasi Keamanan

Pada tahun 1975 seorang tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai ondoafi muda, Bpk Nasarius Fatagur bersama dengan Bpk Mathias F. Borotian menyatakan bahwa wilayah Keerom Aman. Pernyataan kedua tokoh tersebut dilakukan di Gereja Katolik Arso Kota dan ditandai dengan pematahan panah dan busur.

Peristiwa besar yang dilakukan oleh kedua tokoh itu di Arso kemudian diikuti oleh kembalinya masyarakat ke desa-desa. Sebelumnya masyarakat hidup di hutan-hutan bahkan sampai mereka bisa melintasi perbatasan negara RI ke PNG. Pada tahun 1987 keluar seruan yang dibuat oleh MUSPIDA TK I Irian Jaya. Isi seruan tersebut adalah ajakan kepada saudara-saudara yang masih hidup di hutan-hutan untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Mereka yang kembali akan diterima sebagai warga negara secara wajar dan bijaksana. Seruan tersebut di terima Bpk. Nasarius Fatagur di Arso Kota tahun 1987.⁵⁸

Pada masa-masa awal pembukaan lahan perkebunan sawit, seorang muda bernama Pak Roni Fatagur di Desa PIR V pernah ditahan pihak keamanan karena mencoba melarang perusahaan membuka hutan di daerahnya untuk perkebunan kelapa sawit. Pak Roni Fatagur kemudian dibawa oleh pihak keamanan ke pos tentara namun kemudian dia dikembalikan ke tempat tinggalnya kembali oleh seorang polisi.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit membutuhkan tenaga-tenaga kerja (petani). Petani-petani didatangkan dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari masyarakat setempat, ada yang dari daerah lain (di Papua dan luar Papua). Seorang petani sawit di Desa Workwana yang bernama Pak Thomas Wenda pernah dicurigai sebagai OPM karena dia dianggap memiliki hubungan dengan tokoh OPM yaitu Mathias Wenda yang hidup di sekitar perbatasan. Kecurigaan pihak keamanan membuat Pak Thomas Wenda merasa takut dan dia memutuskan untuk pergi keluar dari Desa Workwana. Namun niat ini kemudian dibatalkan karena dia bersama dengan Pak Lamber Welip pergi menghadap ke Pos Keamanan di Tami untuk klarifikasi statusnya bahwa dia tidak ada kaitan dengan tokoh OPM Wenda yang selama ini diincar oleh pihak keamanan. Cerita ini juga dibenarkan oleh Bpk. Rutin Murip yang juga tokoh masyarakat di Arso.

⁵⁸ Isi seruan tersebut dapat dilihat pada lampiran 13.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa petani sawit khususnya masyarakat pribumi mengalami kerugian besar (kemunduran) dalam pelbagai bidang kehidupan sejak hadirnya perkebunan sawit PTPN II Tanjung Morawa di Arso tahun 1982/1983. Beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari hadirnya perkebunan kelapa sawit adalah:

a. Lingkungan hidup

Hutan yang dibuka di Arso untuk perkebunan sawit saja mencapai 10.700 hektar (di luar pemukiman petani, dan sarana umum lainnya) maka sebagian besar potensi alam seperti sagu, kayu, babi, ikan, burung, semakin sulit untuk ditemukan padahal kekayaan alam tersebut telah terbukti mampu memberi kehidupan kepada nenek moyang orang Arso. Pembukaan hutan (degradasi dan deforestasi) mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan yang berpotensi besar terjadinya bencana alam dan penurunan derajat kesehatan.

Dampak lingkungan lainnya dari pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang menyebabkan sistem alami dalam tanah terganggu dan akibatnya tanah tidak produktif bila dimanfaatkan kembali.

b. Ekonomi

Kehadiran kelapa sawit diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan kepada petani namun kenyataannya justru semakin menyusahkan. Peningkatan pendapatan yang diharapkan sesuai dengan latar belakang diterapkannya pola PIR tidak tercapai. Juga kewajiban petani untuk membeli seluruh hasil kebun plasma tidak dilaksanakan oleh perusahaan.

Pendapatan petani sawit bila mengerjakan lahannya sendiri sekitar Rp 500.000,-/bhn dan bila mengontrakkan lahannya Rp. 300.000,-/bhn atau berkisar antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp.16.700,- /kk/hari.

Hingga saat ini belum ada upaya peremajaan kelapa sawit padahal sudah produksinya sudah menurun karena sudah mencapai umur 25 tahun. Selain itu juga harga TBS masih rendah dan pabrik kelapa sawit (PKS) masih rusak.

c. Sosial budaya

Masuknya perkebunan sawit membawa perubahan kepada tatanan sosial budaya dalam masyarakat pribumi. Masyarakat mengalami "*shock culture*". Di bidang pangan, anak-anak cenderung untuk makan nasi daripada papeda. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena papeda merupakan makanan asli yang sudah turun-temurun. Pola bertani masyarakat asli juga berubah dari peramu meloncat langsung ke sistem yang modern. Perubahan ini tidak mampu diterima secara penuh. Sekarang masyarakat cenderung memilih untuk mengembangkan perkebunan kakao daripada sawit.

Dampak sosial yang juga dapat dirasakan adalah jumlah atau komposisi penduduk antara pribumi dan non pribumi sudah terbalik. Pada awalnya jumlah penduduk pribumi lebih besar namun sekarang jumlah penduduk non pribumi lebih besar. Ini berakibat pada kehidupan sosial budaya masyarakat sehari-hari.

- d. Hak ulayat
Konflik yang ditimbulkan akibat pelepasan tanah hak ulayat hingga kini terus berlangsung. Lahan yang sudah dilepaskan dan memiliki surat pelepasan adat (walaupun bermasalah) adalah 63.310 ha. Lahan tersebut dilepaskan sejak tahun 1981 untuk pemukiman dan perkebunan sawit. Sampai sekarang belum tahu persoalan klaim atas tanah akan berakhir.
- e. Keamanan
Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Arso terkait juga dengan situasi keamanan. Masyarakat merasa cemas bila melakukan protes terhadap perusahaan perkebunan sawit namun kenyataannya dihadapkan pada pihak keamanan.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian kelapa sawit dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat di Arso maka beberapa saran yang bisa diberikan adalah

- a. Diharapkan Tim Pastoral Dekenat Keerom dapat mengembangkan perencanaan pastoral yang sesuai dengan kondisi umatnya yang sebagian besar adalah petani sawit.
- b. Masyarakat pribumi dan non pribumi diharapkan untuk mengusahakan kelapa sawit juga sekaligus mengembangkan tanaman kakao di lahan budidaya $\frac{3}{4}$ ha. Masyarakat dihimbau supaya tidak menjual tanahnya. Kepada masyarakat pribumi diharapkan mengajarkan anak-anak supaya tetap mengkonsumsi papeda dan bukan hanya nasi.
- c. Kepada pemerintah diharapkan supaya mengganti kelapa sawit dengan kakao karena kakao bisa dikerjakan oleh perempuan dan anak-anak karena pengembangan kelapa sawit hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan sarana jalan yang digunakan untuk mengangkut sawit.
- d. Perusahaan diharapkan supaya memperbaiki pabrik kelapa sawit dan segera meningkatkan kapasitas olahannya (tidak seperti sekarang yang hanya 14 ton/jam). Juga mengharapakan supaya harga TBS ditingkatkan (disesuaikan dengan harga di tempat lain seperti di Sumatera) sehingga petani memperoleh manfaat lebih.
- e. Pihak keamanan khususnya di Arso diharapkan berperan sebagai pelindung masyarakat dan bukan untuk menakut-nakuti masyarakat yang sebagian besar adalah petani yang tidak tahu soal politik.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Spekulasi Picu Harga CPO Anjlok: Harga TBS Petani Turun Lebih Awal*, Kompas, 21 Juni 2008.
- Anwar Musadad, Dkk. *Pengembangan Model Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan (PBL) Melalui pendekatan Kota Sehat*. Sebuah Abstrak, diakses di <http://www.ekologi.litbang.depkes.go.id/data/abstrak/AMusadad2>, pada tgl 5 Juni 2008, pukul 10.15 WP
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Keerom Dalam Angka 2007*. Keerom: BPS, 2007.
- Banawiratma, J.B. *Iman, Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. *Kesehatan Lingkungan*. Diakses di <http://www.dinkes-kabtangerang.go.id/index>, pada tanggal 15 Juni 2008, pukul 12.15 WP
- Ekawati, Arti. *13 Perusahaan Sawit Ajukan Izin di Papua*. Koran Tempo, Senin, 2 Juni 2008.
- Fauzi, Yan, dkk. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.
- Jonga, John. *Dampak PIR Kelapa Sawit Arso Terhadap Ruang Gerak Masyarakat Arso*. Kabar dari Kampung No. 61/Th XI, Agustus 1993. Jayapura: YPMD, 1993.
- Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara. *Profil Singkat PTP Nusantara II*. Diakses melalui www.kpbptpn.co.id/profile tanggal 5 Juni 2008 (jam 12.00 wp).
- Patay, Marthin. *Studi Kehadiran PTP-II Perusahaan Inti Rakyat Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Petani Calon Peserta Plasma di Prafi-Manokwari dan Arso-Jayapura Irian Jaya*. Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya. Jayapura: YPMD, 1991.
- PTP II Kebun Arso. *Laporan Singkat Pada Kunjungan Bapak Direksi PTP II Tanjung Morawa-Medan*. Arso: PTPN II Kebun Arso, 1994.
- Sinawil, Wilhelmus. *Ekosistem Menurut Orang Arso*. Kabar dari Kampung No. 61/Th. XI, Agustus 1993. Jayapura: YPMD, 1993.
- Tim Sintese. *Sintese Kapasitas Pembangunan Papua*. Jayapura: Tim Sintese, 2005.
- Voorhoeve, C.L. *North Eastern Irian Jaya*. Diakses di <http://www.papuaweb.org/gb/peta/pl/ne-irja-index.gif>, pada tanggal 5 Juni 2008 pukul 13.30 WP.
- Wardhana, Wisnu Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1985
- Wisanggeni, Aryo. *Kelapa Sawit: Menabur Benih di Tanah Peramu*. Kompas, 11 Januari 2008.

DRAFT ACTION PLAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PIRSUS DAN PIRKKA PTPN II di KABUPATEN KEEROM PROP. JAYAPURA

No.	Kegiatan	Agustus -05				Sep-05				Oktober-05				Nopember - 05				Desember -05				Cat Put	Koordinator
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Peremuan Koordinasi Untuk penyelesaian permasalahan pembayaran TBS(Meneg BUMN PTPN II, Diijebun).																			Kepastian pembayaran pembelian TBS	Meneg. BUMN / Diijebun		
2.	Peremuan merumuskan Pola Usaha dan Mitra strategis untuk PTPN II (Meneg. BUMN, PTPN II Diijebun).																			Kepastian kelanjutan PTPN II sebagai inti	Meneg BUMN/ Diijebun		
3.	Peremuan Koordinasi penyelesaian permasalahan pembayaran PIR KKPA (BI, PT PNM, BNI, Meneg. BUMN, PTPN II, Depkeu, Diijebun).																			Kejelasan /kepastian penyelesaian Prefinansing dan pembayaran bunga	Meneg. BUMN / Diijebun		
4.	Peremuan dalam rangka optimasi kegiatan pembangunan perkebunan Kab. Keerom dgn. Sumber dana Dekon/ Pemda, Distun Papua, Distun Keerom, Diijebun)																			Adanya kegiatan pembangunan perkebunan di Kab. Keerom	Diijebun		
5.	Penyusunan rancangan bangun Perkebunan Kab. Keerom (Pemda, Papua, Keerom, Distun Papua, Distun Keerom, Diijebun)																			Rancangan Bangun pembangunan Perkebunan Kab. Keerom	Pemda Kab. Keerom, Diijebun		

WAKIL PETANI

P. TIRANDA, SH

Pdt. EDY TOGODLY

DPRD KABUPATEN KEEROM

DR. HERMAN YOKU

Jakarta, 28 Juli 2005

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan

Sekretaris

~~Dr. Imran Niazooef, M.D.~~



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
TANJUNG MORAWA, SUMATERA UTARA

BOX : 4 Medan
: (061) 7940055
: (061) 7940233 /
: (061) 7940182

PTPN II KEBUN ARSO
Jln. Jeruk Nipis No. 188
Telp. : (0967) 585803
F a x. : (0967) 582543
Jayapura - Papua

Nomor : II.ARS/X/04 / I / 2008
Lamp. : 1 (Satu) lembar
Hal : PENETAPAN JADWAL PANEN

Arso, 25 Januari 2008

Kepada Yth ;
Bapak Bupati Kabupaten Keerom
Di

K E E R O M.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kapasitas Olah Pabrik Kelapa Sawit PTP Nusantara- II di Arso VII ,yang kemampuan Olah 14 Ton/Jam atau 300 Ton /hari ,maka kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa telah diadakan kesepakatan bersama antara PTP Nusantara II Kebun Arso dan Gapoktan petani PIR, OAKSA ,Apkasindo, tentang Jadwal Panen dan angkut TBS (Tandan Buah Segar) yang telah disepakati.

Berkaitan dengan maksud tersebut kami sampaikan kepada Bapak Bupati, bahwa Pabrik kelapa sawit tsb.sedang dalam perbaikan.

Dan perkembangan perbaikan pabrik tsb,akan kami laporkan pada Bapak setiap bulan.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat diketahui.

Hormat kami
PTP NUSANTARA- II
KEBUN ARSO PAPUA


J. WORENGGA.

Sehubungan

1. Ketua DPRD Keerom
2. Ketua DPRD Keerom
3. Kepala Dinas Perkebunan Kab.Keerom
4. Kapolres Persiapan Kab.Keerom
5. Kepala Dinas Tanaman PTP N II Kebun Arso
6. Kepala Dinas Teknik/Pengolahan Kebun Arso
- ⑦ Gapoktan *Afd. U Plasma*
8. Apkasindo

Lampiran 3. Daftar Anggota Kelompok Tani Yang Menerima Gaji

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DISTRIK ARSO
KAMPUNG YAMTA - PIR II

AFDELING II KEBUN ARSO
DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI
YANG MENERIMA GAJIAN KELAPA SAWIT
BULAN FEBRUARI 2008

Kampung Yamta.

No	Kelompok	Jumlah Anggota	Yang Menerima	Yang Tidak Menerima
1.	I.	25 KK	3	22
2	II	27 KK	7	20 KK
3	III	22 KK	4	18 KK.
4.	IV.	20 KK.	2.	18. KK.
5	V.	21	4	17 KK.
6				
6	VI	25 KK	13	12 KK
8	VIII	24 KK	11 KK	13 KK
9	IX	26 KK	5 KK	21 KK
10	VII	21 KK.	2 KK.	19 KK.
	Jumlah.	208 KK	48 KK.	160 KK.
			23 %	77 %.



Arso 13 Maret 2008
Kepala Kampung Yamta.
Armas Kebelan, BA

Lampiran : 3 b : Kampung Yanamaa : Pir I

AFDELING I KEBUN ARSO
DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI
YB MENERIMA GAJIAN KELAPA SAWIT
PEBRUARI 2008

No.	KELOMPOK	JML. ANGGOTA	YB TERIMA GAJIAN	YB TIDAK TERIMA G.
1.	Kelompok <u>IV</u>	22 KK	3 KK	19 KK.
2.	Kelompok <u>V</u>	20 KK	—	20. KK
3.	Kelompok <u>VIII</u>	19 KK	7 KK	12 KK.
4.	Kelompok <u>X</u>	19 KK	6. KK	13 KK.
5.	Kelompok <u>XI</u>	24 KK.	8 KK.	16 KK
6.	Kelompok <u>XII</u>	22 KK	7 KK	15 KK
7.	Kelompok <u>XIV</u>	17 KK	6 KK	11 KK.
8.	Kelompok <u>XIX</u>	19 KK.	6 KK	13 KK.
	Jumlah.	162 KK	43 KK.	119 KK.
	Prosentase		26,5 %	73,5 %

Arso, 15 Maret 2008.

Pengumpul data
Pengurus FORUM PETANI

Pdt. EDY TOGODLI





PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
TANJUNG MORAWA, SUMATERA UTARA

.O. BOX : 4 Medan
elp. : (061) 7940055
a x. : (061) 7940233 /
(061) 7940182

PTPN II KEBUN ARSO
Jln. Ardipura III No. 18
Telp. : (0967) 532188 - 53237
F a x. : (0967) 531574
Jayapura - Papua

Nomor : II.AR/X/03 /I/2005
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Keterlambatan Pembayaran
Pembelian TBS Petani
Kelapa Sawit.

Kepada Yth
Bapak Bupati Kabupaten Keerom
di -

Arso

Dengan hormat,

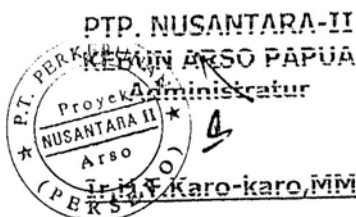
Dengan ini kami laporkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Keerom bahwa pembayaran TBS Petani Kelapa Sawit akhir – akhir ini sering mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan, karena kondisi keuangan PTP.N-II Tg.Morawa – Medan selama 3 tahun terakhir ini kurang baik. Hal ini dapat dilihat sesuai surat Direksi PTP.N-II kepada Bapak Gubernur Propinsi Papua No : II.AR/X/18/I/2004, hal mohon penanguguhan Upah Minimum Propinsi/Sektoral Tahun 2004, tanggal 19 Januari 2004 seperti terlampir. Adapun yang sampai saat ini belum terbayar adalah sebesar Rp. 5.074.502.000,- (Lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) yaitu dari penjualan TBS periode tanggal 16 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

Perlu kami informasikan bahwa kewenangan dan keputusan pembayaran TBS tersebut berada di tangan Direksi PTP.N-II Tg.Morawa – Medan, sedangkan Pimpinan PTP.N-II Kebun Arso hanya sebagai unit pelaksana tugas yang dibebankan oleh Direksi.

Akibat Cash-Flow keuangan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan, maka Direksi melakukan penundaan – penundaan pembayaran kewajiban perusahaan, baik kepada karyawan sendiri maupun kepada pihak III, termasuk dalam hal ini pembayaran pembelian TBS Petani Kelapa Sawit yang ada di Kebun Arso.

Selubungan kondisi tersebut diatas Direksi sampai dengan hari ini belum mengirim/mentransfer uang pembelian TBS Petani sampai waktu yang belum dapat dipastikan kapan dibayarkan, yang jelas Direksi berjanji akan membayar pembelian TBS tersebut menjadi prioritas utama, bila dana sudah didapatkan.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Keerom, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. DPRD Kab. Keerom
2. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Keerom



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
(P E R S E R O)
TANJUNG MORAWA - MEDAN

P.O. Box : No. 4 Medan, Indonesia
Telex : 51749 ptpdua la
Fax : (061) 7940233
Telp. : (061) 7940055
(HUNTING SYSTEM)

19 Januari 2004

Nomor : II.0/X/18 /I/2004.

Hal : MOHON PENANGGUHAN UPAH MINIMUM
PROPINSI/SEKTORAL TAHUN 2004.

Yth. : Bapak Gubernur
Propinsi Papua
Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Papua
di
JAYA PURA.

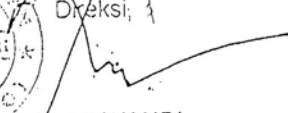
Dengan hormat,

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor . 166 Tahun 2003 Tanggal 21 Oktober 2003 tentang Penetapan Upah Minimum , dengan ini kami beritahukan bahwa PTP Nusantara II (Persero) belum mampu membayar upah sesuai Ketentuan Upah Minimum Propinsi dimaksud .

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-undang Ketenaga kerjaan RI No.13 tahun 2003 j.o. Pasal 19 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP-226/MEN/2000 tanggal 5 Oktober 2000, kami Direksi PTP Nusantara II mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum Propinsi/Sektoral dimaksud dengan pertimbangan :

1. Tingkat likwiditas keuangan PTPN-II yang sangat memburuk, dan pada tahun 2001, 2002, 2003 PTPN-II mengalami kerugian.
2. Kewajiban yang belum dapat diselesaikan/dibayar sampai dengan Bulan Desember 2003 sebesar Rp.860.497.849.000,- (Delapanratus enampuluh milyar empatratus sembilanpuluh tujuhjuta delapanratus empatpuluh sembilanribu rupiah), rincian terlampir.
3. Terlampir berkas-berkas melengkapi permohonan untuk penangguhan UMP dimaksud.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PTP. NUSANTARA - II
Direksi,

Ir. H. SUWANDI
Direktur Utama.

- Tembusan :
1. Bapak Menakertrans RI
 2. Bapak Meneg BUMN RI
 3. Bapak Menteri Keuangan RI
 4. Bapak Deputi Meneg Bidang Agro Industri.
 5. Dewan Komisaris PTPN-II
 6. Disnakertrans Propinsi Papua
 7. BKS-PPS
 8. Kepala Korwil PTPN Wilayah-I
 9. SP dilingkungan PTPN-II
 10. Pertinggal.

Lampiran 6. Surat Pernyataan Pelepaan 1.310 ha



SURAT PERNYATAAN
PELEPASAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. N a m a : Ir.D.Simanjuntak
Pekerjaan/Jabatan : Administratur PTP-II Proyek Arso
A l a m a t : A r s o

Bertindak untuk dan atas nama PT.Perkebunan II

II. N a m a : Mikael Wabyager
Pekerjaan/Jabatan : Ondo api Workwana Kecamatan Arso
Kabupaten Jayapura.

Bertindak untuk dan atas nama masyarakat Adat Penggarap
pada areal Inti 1.310 Ha.

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa :

1. Areal 1.310 Ha dipergunakan untuk Kebun Kelapa Sawit Inti
2. Apabila areal Inti 1.310 Ha tidak lagi dimanfaatkan oleh PTP-II maka kepada masyarakat akan diberikan hak atas tanah tersebut.

Demikianlah Pernyataan ini kami buat dengan sadar dan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : A r s o
Pada Tanggal : 8 Desember 1992



Tanda Tangan Pihak Kedua

Ir.D.Simanjuntak.-

Tanda Tangan Pihak Pertama

..Mikael Wabyager ..



U S P I K A K E C A M A T A N A R S O



Kapala Wilayah Kec.Arso

Drs.Ikram Baasalem.-
NIP.010081918

Kapolsk Arso

..Dwi Karyanto..
Letda Pol.NRP.65012369



Lampiran 7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat 18.000 Ha.

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DEMIANUS BOROTIAN.
Umur : 35 tahun.
Kedudukan : Ondoafi Arso Kota.
Alamat : Desa Arso Kota.
2. Nama : MICHAEL WABYAGIR.
Umur : 47 tahun.
Kedudukan : Ondoafi Workwana.
Alamat : Desa Arso Kota.
3. Nama : ALBERTUS KIYAWAT.
Umur : 30 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Kiyawat, Giryar dan Tafor.
Alamat : Desa Arso Kota.
4. Nama : IVO GIRRES.
Umur : 26 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Girbes.
Alamat : Desa Arso Kota.
5. Nama : NAZARIUS FATAGUR.
Umur : 30 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Fatagur.
Alamat : Desa Workwana.
6. Nama : KONDEAT BATE.
Umur : 30 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Bate.
Alamat : Desa Workwana.
7. Nama : FRANSIKUS BABUT.
Umur : 28 tahun.
Kedudukan : Kepala Keret Babut.
Alamat : Desa Workwana.

adalah yang mempunyai hak atas tanah adat/hak ulayat yang terletak di Skanto
Desa Arso Kota dan di Desa Workwana.

Kecamatan : Arso.
Daerah Tingkat II : Jayapura.
Luas tanah : 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar). I. 6000 Ha Skanto
II. 12.000 Ha. Workwan

I. Batas-batas untuk Skanto :

Utara : Kali Skanto.
Timur : Kali Tami.
Selatan : Tanah adat Desa Arso Kota.
Barat : Tanah adat Desa Arso Kota.

II.

II. Batas-batas untuk Desa Workwana :

Utara : Tanah Adat Desa Arso Kota.
 Timur : Kali Tami.
 Selatan : Tanah Adat Desa Workwana.
 Barat : Tanah Adat Desa Kwimi.

Dengan ini kami menyatakan di hadapan Kepala Desa Arso Kota, Kepala Desa Workwana, Dansek Arso, Koramil Arso dan Kepala Wilayah Kecamatan Arso bahwa :

1. Tanah tersebut adalah hak turun temurun yang kami peroleh dari Adat, dan telah menjadi milik/ulayat kami.
2. Tanah tersebut kami lepaskan hak adatnya/hak ulayatnya termasuk tanam-tanaman dan benda-benda yang tidak bergerak lainnya yang ada diatas tanah tersebut, sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
3. Dengan pernyataan pelepasan hak atas tanah ini, kami tidak akan menuntut kembali hak atas tanah tersebut.
4. Dengan pelepasan hak atas tanah dan tanaman yang ada di atasnya tersebut kami menyatakan menyetujui tidak dengan pemberian ganti rugi, terkecuali ganti rugi akan diberikan atas tanaman-tanaman budi-daya (yaitu tanaman-tanaman yang ditanam dan nyata-nyata dipelihara oleh pemiliknya).
5. Kami menyatakan menyetujui isi surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Jayapura Nomor: 18/KPTS/Pan/1981 tanggal 9 Juli 1981 dan surat Keputusan tersebut telah dibacakan dihadapan kami oleh Panitia.
6. Surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun dengan sebenarnya.-

Arso, 9 Juli 1981.

Yang membuat Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah:

1. DEMIANUS BOROTIAN
2. MICHAEL WABTAGIR
3. ALBERTUS KIWAWAT
4. IVO GIRBES
5. NAZARIUS FATAGUR
6. KONDRAT BATE
7. FRANSIKUS BABUT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



1. Kepala Desa Arso Kota (MODESTUS TUAMIS).
2. Kepala Desa Workwana (YACOB GUSBAGER).

Menggetahui kebenaran dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah

1. Kepala Wilayah Kecamatan Arso. M A T (FRANS DUMATUBUN. BA).



2. Kosak 1701 - 06 Kecamatan Arso.

Koptu C. KİYAT.

3. Koramil 1701 - 04 Kecamatan Arso.

Pelcops ABDUL LATIF.

Menyaksikan dan menyetujui pelepasan hak atas tanah adat tersebut diatas :

1. KASIMIRUS GIMBES
Ketua AMPI Rayon Kecamatan Arso.

1.

2. BERNARD NOYAGIR
Tokoh Masyarakat Arso Kota

2.

3. KARIL TUAMIS
Tokoh Masyarakat Arso Kota

3.

4. SAMUEL NOYAGIR
Tokoh Masyarakat Arso Kota

4.

5. CHRISANTUS THAIGET
Tokoh Masyarakat Arso Kota

5.

6. GASPER PATAGUR
Tokoh Masyarakat Desa Warkwana

6.

7. AMIROSIUS LABYAGER
Tokoh Masyarakat Desa Warkwana

7.

Lampiran 8. Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk II Jayapura

Pasal 6 angka (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri

N o m o r : 15 Tahun 1975.

Tanggal : 3 Desember 1975.

Nomor : 18/KPTS/Pan/1981.

Lampiran : —

KEPUTUSAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH DAERAH

TINGKAT II JAYAPURA

- Hasil** : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 056.2/1392 tanggal 20 Mei 1981.
- Merencanakan mengadakan inventarisasi setempat** : Tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah rencana lokasi Transmigrasi di Desa Arso Kota dan Desa Workwana Kecamatan Arso Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- Mengadakan perundingan / musyawarah** : 1. Dengan para pemilik tanah dan tanaman/bangunan.
2. Dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Transmigrasi.
3. Dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura.
- Memperhatikan** : 1. Harga tanah dan tanaman serta bangunan.
2. Status Tanah.
3. Kesiadaan Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura.
4. Kesiadaan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Transmigrasi Propinsi Irian Jaya.
5. Lokasi.
6. Harga usus setempat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969.
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 1975.
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 24/KPTS/Bup-Jp/1979 tanggal 23 Mei 1979.
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 35/KPTS/BUP-JP/1980 tanggal 25 Juni 1980.

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** : Menetapkan bahwa tanah seluas 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar) terdiri dari 6.000 Ha di Arso Kota (Skanto) dan 12.000 Ha di Workwana (Desa Workwana), Kecamatan Arso, Daerah Tingkat II Jayapura, adalah tanah yang akan diserahkan oleh para pemiliknya kepada Negara dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- KEDUA** : Penyerahan tanah kepada negara tanpa pemberian ganti rugi, terkecuali pemberian ganti rugi atas tanaman-tanaman budidaya (yaitu tanaman-tanaman yang ditanam dan nyuta-nyuta dipelihara oleh pemiliknya).
- KETIGA** : Menyampaikan keputusan ini kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura, kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Transmigrasi Propinsi Irian Jaya selaku instansi yang akan mengelola/menggunakannya kepada Saudara :
1. Domianus Borotian, Ondofa Arso Kota.
 2. Michael Wabyagir, Ondofa Workwana.
 3. Albertus Kiyawat, Kepala Keret Kiyawat, Giryar dan Mor.
 4. Ivo Girbes, Kepala Keret Girbes.
 5. Nazarius Fatagur, Kepala Keret Fatagur.
 6. Kondrat Bato, Kepala Keret Bato.
 7. Fransiskus Babut, Kepala Keret Babut.
- seluruh pemilik tanah adat untuk mendapat persetujuan.

Ditetapkan di : A r s o .
Pada tanggal : 9 Juli 1981.

Lampiran 9. Keputusan Tentang Pelepasan dan Penunjukkan Tanah Untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II Jayapura.

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR : 59/KPTS/134P-8P/1981

T E N T A N G :

PELEPASAN DAN PENUNJUKAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK TRANSMIGRASI ARSO KOYA DI KECAMATAN ARSO DAN KECAMATAN ABEPURA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA,

Menimbang

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan tanah ulayat dari masyarakat adat Arso Desa Arso Kota, Workwana Desa Workwana Kecamatan Arso tanggal 9 Juli 1981 dan dari masyarakat adat Koya Desa Mafri Kecamatan Abepura tanggal 19 Agustus 1981, yang akan digunakan untuk Proyek Transmigrasi.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura.

Memingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N.R.I. Tahun 1974 Nomor 38);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 (L.N.R.I. Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 (L.N.R.I. Tahun 1972 Nomor 33);
4. Peraturan Direktorat Jendral Agraria/Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967;
5. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Ketua Koordinator Penyelenggaraan Transmigrasi Nomor 021/Men/1981, tanggal 23 Februari 1981.

Memperhatikan

1. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 475.1/668 tanggal 31 Maret 1981, dan Radiogram Nomor 056.2/1392 tanggal 20 Mei 1981;
2. Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Nomor 18/Kpts/Pan/1981 tanggal 9 Juli 1981 dan Nomor 18.A/Kpts/Pan/1981 tanggal 9 Juli 1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

: Melepaskan dan menunjuk tanah Negara bekas tanah ulayat untuk dijadikan sebagai lokasi Proyek Transmigrasi seluas 28.000 ha (dua puluh delapan ribu hektar) dengan perincian sebagai berikut :

a. Di Kecamatan Arso :

- Lotak tanah di Workwana . Desa Workwana, seluas 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) dengan batas-batas : sebelah Utara tanah adat Desa Arso; sebelah Selatan tanah adat Desa Workwana; sebelah Timur sungai Tami dan sebelah Barat tanah adat Desa Kwimi.

- Lotak tanah di Skanto Desa Arso Kota, seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar) dengan batas-batas : sebelah Utara sungai Skanto, sebelah Selatan tanah adat Desa Arso Kota, sebelah Timur sungai Tami dan sebelah Barat tanah adat Desa Arso Kota.

Da ..

b. Di Kecamatan Abepura :

Letak tanah di Koya Desa Nafri, seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) dengan batas-batas : sebelah Utara tanah Suku Veep, Kamele dan Suku Sibri, sebelah Selatan Kecamatan Arso, sebelah Timur rawa-rawa/hutan belukar dan sebelah Barat hutan belukar.

EDCA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diatur kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di : J a y a p u r a .

Pada tanggal : 17 September 1981.



THONTJE MESET.

Lampiran 10. Keputusan Bupati Jayapura Tentang Perubahan Lokasi Tanah Untuk Transmigrasi

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMOR : 31/KPTS/BUP-JP/1983

T E N T A N G

PERUBAHAN LOKASI PENCADANGAN TANAH UNTUK PROYEK
TRANSMIGRASI DI KECAMATAN ARSO
DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat kepada Negara oleh Ondoafi Desa Arso Kota Saudara Demianus Borotian, Ondoafi Kwimi Sdr Michael Kwimi, Ondoafi Bato Sdr. Paulus Bate bersama para Ketua-ketua Ke - retnya tanggal 19 Oktober 1982, untuk dikuasai langsung oleh Negara untuk kepentingan pembangunan Proyek-proyek Pemerin - tah di Kecamatan Arso ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (LNRI Tahun 1960 No. 104);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LNRI Tahun 1974 NO. 38);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 (LNRI Tahun 1969 NO. 47);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 (LNRI Tahun 1972 NO. 33);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Ketua Koor - dinator Penyelenggaraan Transmigrasi Nomor 021/Men/1982, ta - nggal 23 Februari 1981 .

Memperthatikan

- : 1. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 475.1/868 tanggal 31 Maret 1981 dan Radiogram Nomor 056.2/- KPTS/BUP-JP/1982 tanggal 20 Mei 1981 ;
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No - mor 59/LTS/BUP-JP/1981 tanggal 17 September 1981 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 525/ 2770 tanggal 8 Oktober 1982 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

- : Membatalkan Areal seluas 12.000 Ha di Desa Workwana yang di - a - dangkan untuk Proyek Transmigrasi dan sebagai pengganti lokasi tersebut melepaskan dan menunjuk tanah Negara bekas tanah Ula - yat yang terletak di Wilayah Desa Arso Kota dengan batas-batas - nya sebagai berikut :

U t a r a :

Utara : Tanah Negara untuk Proyek Transmigrasi ;
 Selatan : Jalan Arso - Kwimi ;
 Timur : Sungai Timur ;
 Darat : Tanah Adat masyarakat Bate ;

KEDUA : Batas tanah tersebut dicadangkan untuk :

1. Proyek Transmigrasi ;
2. Pengembangan Ibu kota Kecamatan Arso seluas 1.675,5 Ha (seribu-enam ratus tujuh puluh lima koma lima) Ha itu lahan SPF1 yang - dicadangkan untuk Proyek Transmigrasi.

KETIGA : Menetapkan areal tanah seluas 12.000 Ha (dua belas ribu) Ha di Warkwama tersebut pada point PERTAMA untuk Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diurut kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : J a y a p u r a

Pada tanggal : 4 M e i 1983.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 TINGKAT II JAYAPURA NOMOR : 31
 SERI A.1/V TANGGAL 4 M E I 1983
 SEKRETARIS DAERAH TK. II JAYAPURA
 C.P./TTD.

B. PARULIAN GULTOM. SH
 NIP. 010055153.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
 C.P./TTD.
 B A S Y O U W E
 NIP. 640002511.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan
 aslinya

SEKRETARIS DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

U.B.

KEPALA BAGIAN HUKUM

M. Z A I D I R. SH

NIP. 010053145.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan
 Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Pertanian RI di Jakarta ;
3. Bapak Menteri Nakertrans RI di Jakarta ;
4. Bapak Menteri Muda Urusan Transmigrasi R.I. di Jakarta ;
5. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
6. Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
7. Dirjen Transmigrasi Departemen Nakertrans di Jakarta ;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura ;
9. Kadit Agraria Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura ;
10. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Irian Jaya ;
11. Kepala Kenwil Ditjen Transmigrasi Propinsi Dati I Irian Jaya ;
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Irian Jaya ;
13. Para anggota MUSPIDA Tingkat II Jayapura ;
14. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jayapura ;
15. Kepala Dinas Otonom/Vertikal se-Kabupaten Dati II Jayapura ;
16. Kepala Kantor Transmigrasi Kab.Daerah Tk.II Jayapura ;
17. Para Camat se-Kabupaten Jayapura ;
18. r s i p (Bagian Hukum) Setwilda Tk.II Jayapura ;

Lampiran 11. Surat Pelepasan Tanah Adat 50.000 ha

SURAT PENGANTARAN PELEPASAN TANAH ADAT 50.000 ha

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DAMILAU BOKOTIAN
Umur : 35 tahun
Kedudukan : Undaafi Arso Kota
Alamat : Desa Arso Kota
2. Nama : IVO GIRBAS
Umur : 29 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Girbas
3. Nama : ALBART RIYAWAT
Umur : 3+ tahun
Kedudukan : Ketua Keret Riyawat/Giryar
Alamat : Desa Arso Kota
4. Nama : FRANDI TAFOR
Umur : 27 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Tafor
Alamat : Desa Arso Kota
5. Nama : CHIXIMATUS TALIGAT
Umur : 30 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Taliget
Alamat : Desa Arso Kota
6. Nama : SIKAT BOKOTIAN
Umur : 20 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Bokotian
Alamat : Desa Arso Kota
7. Nama : SIKVO TUMASIS
Umur : 29 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Tumas
Alamat : Desa Arso Kota
8. Nama : BANGSI BUKIMIA
Umur : 37 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Bonyagir
Alamat : Desa Arso Kota
9. Nama : DOMINICUS MASAS
Umur : 30 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Masas
Alamat : Desa Arwana
10. Nama : ANGELANUS ABAR
Umur : 31 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Abar
Alamat : Desa Morwana
11. Nama : THOMAS MORASIA
Umur : 42 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Maysasin
Alamat : Desa Arso Kota
12. Nama : RIBO ITUNGKIR
Umur : 30 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Itungkir
Alamat : Desa Morwana
13. Nama : RIBO MORASIA
Umur : 50 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Moras
Alamat : Desa Morwana
14. Nama : DOMINICUS MUSUY
Umur : 50 tahun
Kedudukan : Ketua Keret Musuy
Alamat : Desa Morwana

15. Nama : JULIUS PUTUY
Umur : 35 tahun
Kedudukan : Ketua keret Putuy
Alamat : Desa Workwana
16. Nama : PETRUS RUSUY
Umur : 52 tahun
Kedudukan : Endoafi Wambi
Alamat : Desa Workwana
17. Nama : JULIUS PKEUKIR
Umur : 33 tahun
Kedudukan : Ketua keret Pkeukir
Alamat : Desa Workwana
18. Nama : NAZARIUS PATAGUR
Umur : 35 tahun
Kedudukan : Endoafi Workwana
Alamat : Desa Workwana
19. Nama : KOMORAT BATE
Umur : 31 tahun
Kedudukan : Ketua keret Bate
Alamat : Desa Workwana
20. Nama : FRANS BABUT
Umur : 29 tahun
Kedudukan : Ketua keret Babut
Alamat : Desa Workwana
21. Nama : MICHAEL WABIYAGIR
Umur : 47 tahun
Kedudukan : Endoafi Workwana
Alamat : Desa Workwana
22. Nama : FRANS TAFOR
Umur : 55 tahun
Kedudukan : Ketua keret Tafor
Alamat : Desa Workwana
23. Nama : KARREL KUMIS
Umur : 35 tahun
Kedudukan : Ketua keret Kumis
Alamat : Desa Workwana
24. Nama : JULIUS PATAGUR
Umur : 30 tahun
Kedudukan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Workwana

adalah yang mempunyai hak atas tanah adat/hak ulayat yang terletak di Desa Arso kota dan Desa Workwana.

Kecamatan : Arso

Daerah Tingkat II : Jayapura

Luas tanah : 50.000 Ha (lima puluh ribu hektar)

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah adat/Sebagi Skanto
- Timur : Wilayah Endo
- Selatan : Tanah adat masyarakat Wambi
- Barat : Tanah adat masyarakat Workwana dan Wambi

Dengan ini kami menyatakan dihadapan Kepala Desa Arso Kota, Kepala Desa Workwana, DanSekPol Arso, DanRamil Arso dan Camat Arso, bahwa :

1. Tanah tersebut adalah hak turun temurun yang kami peroleh dari adat, dan telah menjadi milik/ulayat kami.

2. Tanah...../2

2. Tanah tersebut kami lepaskan hak adatnya/hak ulayatnya termasuk tanaman-tanaman dan benda-benda yang tidak bergerak lainnya yang ada diatas tanah tersebut, sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
3. Dengan pernyataan pelepasan hak atas tanah ini, kami tidak akan menuntut kembali hak atas tanah tersebut.
4. Dengan pelepasan hak atas tanah dan tanaman yang ada diatasnya tersebut kami menyatakan menyetujui tidak dengan pemberian ganti rugi, tetapi kecuali ganti rugi akan diberikan atas tanaman-tanaman budi daya (yaitu tanaman-tanaman yang ditanam dan nyata-nyata dipelihara oleh pemiliknya).
5. Kami menyatakan menyetujui isi Surat Keputusan Panitia Pembahasan Tanah Daerah Tingkat II Jayapura Nomor : tanggal dan surat Keputusan tersebut telah dibacakan dihadapan kami oleh Panitia.
6. Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari siapapun dengan sebenarnya.

Dengan ketentuan bahwa kami yang menandatangani surat pernyataan ini sejumlah 24 orang adalah khusus mengenai batas-batas tanah adat kami dan tidak menyangkut tanah adat dari masyarakat yang kini tidak ada ditempatnya. Sehingga dengan demikian kami terlepas dari pada persoalan tanah adat orang lain yang mana apabila ada gugatan dari pemilik tanah yang tidak ada ditempatnya, persoalan ini akan diselesaikan kembali dengan Pemerintah Daerah.

Arso, 19 Oktober 1982

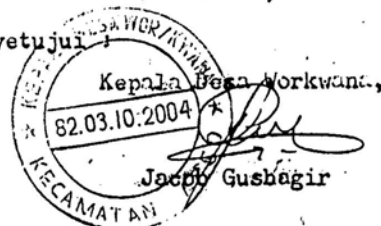
Yang membuat pernyataan pelepasan hak atas tanah :

1. Damianus Borotjan
2. Ivo Girbes
3. Albert Kiyawat
4. Frans Tafor
5. Chrisantus Taiget
6. Simon Borotian
7. Servo Tuomis
8. Samuel Nouyagir
9. Dominicus Masas
10. Anselmus Abas
11. Thomas Muyasin
12. Pius Itungki
13. Elias Bogor
14. Johannes Muxuy
15. Julius Patus
16. Petrus Masuy
17. Jukius Ikaukir
18. Nazarius Palagur
19. Kondrat Bafe
20. Frans Babut
21. Michael Wabiyagir
22. Frans Tafor
23. Karel Kugis
24. Julius Patagur

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]
6. [Signature]
7. [Signature]
8. [Signature]
9. [Signature]
10. [Signature]
11. [Signature]
12. [Signature]
13. [Signature]
14. [Signature]
15. [Signature]
16. [Signature]
17. [Signature]
18. [Signature]
19. [Signature]
20. [Signature]
21. [Signature]
22. [Signature]
23. [Signature]
24. [Signature]



Mengetahui dan menyetujui



Mengetahui

Mengotahui kebenaran dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah
adat tersebut.



1701-04 arso

ABDUL LATIF
NIP. 300861



1701-06 arso

ABDUL LATIF
NIP. 49040067



CAMAT/KEP. LA. MELAYAH KECAMATAN ARSO

PT. DUMATUBUN Bn.
NIP. 010081915

Lampiran 12. Surat Penolakan Masyarakat Terhadap Uang Rp 50 Juta

Hal : Penolakan Uang
Rp. 50.000.000,-

Kepada Yth.
Bapak Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Jayapura
di-

J a y a p u r a

Dengan hormat,

Bersama ini kami seluruh masyarakat Adat Arso datang kepada Bapak untuk menyampaikan bahwa kami dengan tegas menolak uang sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai ganti rugi tanah PIR Arso seluas 50.000 Ha yang di serahkan oleh Pemda Tingkat II Jayapura lewat Bapak Pembantu Bupati Jayapura wilayah keroma bersama keempat oknum orang Arso yang mengatas namakan masyarakat Adat Arso pada tanggal 17 Mei 1997.

Bapak Bupati kepala Daerah Tingkat II Jayapura yang kami hormati, uang tersebut akan kami kembalikan kepada Pemda Tingkat II Jayapura, apabila ada kekurangan itu adalah tanggung jawab saudara Casin Girbes dan Gabriel Muyasin.

Adapun dasar penolakan kami sebagai berikut :

1. Sampai dengan hari ini kami belum mengakui surat pelepasan tanah seluas 50.000 Ha tertanggal 19 Oktober 1982.
2. Uang sebesar Rp 50.000.000,- itu tidak sesuai dengan luas areal yang sudah dan akan dimanfaatkan oleh PTP Nusantara II Di Arso.
3. uang sebesar Rp.50.000.000,- tersebut nilainya tidak sama dengan nyawa-nyawa nenek moyang kami yang berkorban untuk merebut dan mempertahankan tanah sejati leluhur sampai dengan hari ini. Kalau memang uang Rp. 50.000.000,- maka kami masyarakat Adat Arso menilai itu sebagai suatu penghinnaan kepada kami.
4. Kami khawatir dengan pengambilan uang tersebut, kami kehilangan hak atas tanah, sebab tanah seluas Rp. 50.000 Ha yang pernah dilepaskan itu kami sendiri belum mengetahui tentang batas-batas yang jelas.
5. Penyerahan uang tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebab kami masyarakat Adat Arso mempunyai wadah Adat yaitu Dewan Persekutuan masyarakat Adat Arso dan mempunyai pimpinan wilayah yakni Uspika Kecamatan Arso.
6. Penyerahan dan pengambilan uang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan beberapa tokoh masyarakat pada tanggal 12 April 97 di Desa Woorkwana sebab ada beberapa kesepakatan tidak di cantumkan dalam surat permohonan tertanggal 19 April 97
7. Dengan munculnya uang Rp. 50.000.000 ini berarti muncul pula tuntutan kami orang Arso atas seluruh tanah yang dimanfaatkan dalam peluasan PIR Plasma.

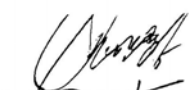
Demikian pernyataan kami, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

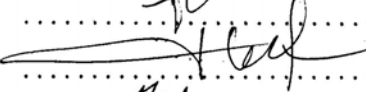
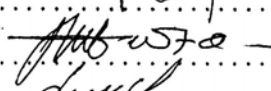
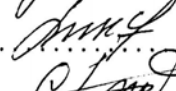
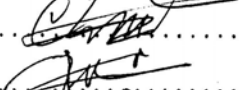
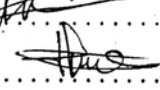
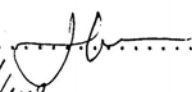
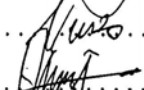
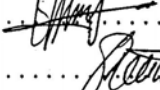
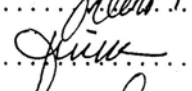
Arso, 24 Mei 1997
Yang Membuat Pernyataan

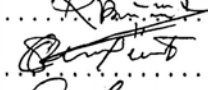
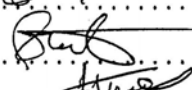
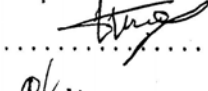
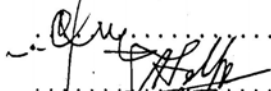
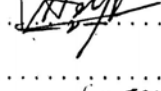
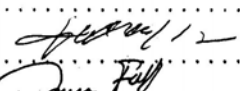
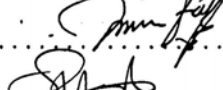
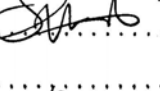
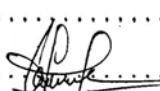
1. MICHAEL NAUYAGIR
2. TITUS MUSUI
3. SERVO TUAMIS
4. THOMAS KIMBER
5. FRANS KIMBER
6. JONATAN BATE
7. SIMON BOROTIAN
8. BEN MEKAWA
9. BENY UBUR
10. LAMBERT KWNINGGIR
11. HUBERTUS YANUFROM
12. THOBIAS TEKAM
13. BERNARD NAUYAGIR
14. HENGKI TAIGET
15. LODIVIKUS NAUYAGIR
16. KAREL URIAGER
17. FRANS TAFOR
18. NASARIUS FATAGUR
19. CHLEMENS KYAWAT
20. ANTON BOROTIAN
21. YERRI GINBES
22. ABRAHAM NAUYAGIR
23. YOHANES NANGGUAR

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

24. NATALIUS KWIMI
25. HASTIAN NANGGUAR
26. YOHANES BATE
27. PAULUS BATE
28. YULIUS FATAGUR
29. HERMAN FATAGUR
30. LONGGINUS FATAGUR
31. FRANS BABUT
32. PIET PEKEUKIR
33. JONATAN YAWAN
34. NICO BOGOR
35. NICO TUAMIS
36. BEDA NAUYAGIR
37. FRANS ADAR
38. RAFAEL NUMBER
39. NICO URIAGER
40. ROBBY BOROTIAN
41. CRISANTUS TAIGET
42. HUBERTUS BOROTIAN
43. KONDRAT BATE
44. GASPAR TAFOR
45. ADOLF NAUYAGIR
46. HENGKI MENEKIR
47. AMATUS TUAM
48. JEMMI FELBA
50. HUBERTUS KWAMBRE
51. NAHOR SIBIAR
52. LAMBERT PEKEUKIR



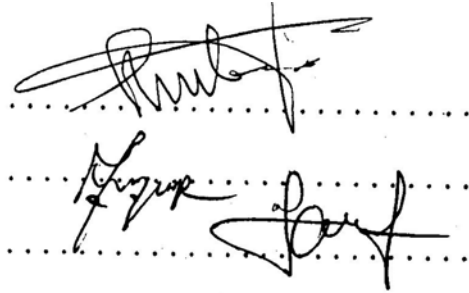











53. PIET NUMBUN

54. FABIANUS TAFOR

55. SIMON SOAM



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya
Di Jayapura.
2. Bapak Pangdam VIII Trikora Maluku Irian Jaya
Di Jayapura
3. Bapak Danrem VIII Trikora I Irian Jaya
Di Jayapura.
4. Bapak Kapolda Irian Jaya
Di Jayapura.
5. Bapak Kepala Kantor Sosial Politik Propinsi Irian Jaya
Di Jayapura.
6. Bapak Ketua DPRD Propinsi Irian Jaya
Di Jayapura.
7. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Irian Jaya
Di Jayapura.
8. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jayapura
Di Jayapura.
9. Bapak Kapolres Jayapura
Di Jayapura.
10. Bapak Dandim 1701 Jayapura
Di Jayapura.
11. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura
Di Jayapura.
12. Bapak Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Jayapura
Di Jayapura.
13. Bapak Pembantu Bupati Jayapura Wilayah Kerom
Di Arso.
14. Para LSM di Irian Jaya
15. Bapak Uspika Arso
Di Arso.
16. Bapak Adm PTPN II Kerom Arso
Di Arso.
17. Bapak Pimpinan Redaksi Harian Berita Cenderawasih Pos
Di Jayapura.
18. Bapak Dan Yom *125 Kodam Bukit Barisan di Arso.*
19. Bapak Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adar Arso
Di Arso.
20. Para kepala Desa di Arso
21. A r s i p

Lampiran 13. Seruan Oleh Muspida TK I Irian Jaya

S E R U A N
MUSPIDA TK-I IRIAN JAYA

SAUDARA-SAUDARA SEBANGSA DAN SETANAH AIR INDONESIA.

KAMI SEMUA MERASA PRIHATIN TERHADAP KEADAAN SAUDARA-SAUDARA YANG SEKARANG INI MASIH BERADA DI HUTAN-HUTAN DENGAN PENUH SENG-SARA DAN JUGA MENGAKIBATKAN PENDERITAAN BAGI ANGGOTA KELUARGA SERTA ORANG TUA YANG DITINGGALKAN.

BERSAMA INI KAMI SEBAGAI PIMPINAN DI DAERAH TK-I IRIAN JAYA MERASA TERPANGGIL UNTUK MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA YANG MASIH BERADA DI HUTAN-HUTAN AGAR KEMBALI KE KAMPUNG HALAMAN MASING-MASING DAN HIDUP BERSAMA KELUARGA DENGAN KASIH SAYANG.

BAWALAH SERUAN INI KEBADA APARAT KEAMANAN TERDEKAT DAN MINTALAH KEPADA MEREKA UNTUK MEMBANTU SAUDARA KEMBALI KE DAERAH KELUARGA SAUDARA, DIMANA SAUDARA AKAN DITERIMA SEBAGAI WARGA NEGERA SECARA WAJAR DAN BIJAKSANA.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA KASIH SELALU BESERTA KITA.

JAYAPURA, 9 SEPTEMBER 1987

GUBERNUR KDH TK-I IRIAN JAYA
PANGDAM VIII/TRIKORA
KAPOLDA IRJA

IZAAC HINDOM
PANGUNEMO ARISMUNAN
MAYOR JENDERAL

KEPOLISIAN NEGARA RI
KEPALA
KOLONEL POL NRP 35080004

KAJATI IRJA
KETUA
KORPRI IRIAN JAYA

JAKSA TINGGI
ALIMUDDIN SH.
FATI ADHYAKSA

KETUA DPRD PROPINSI IRIAN JAYA
BAS SUEBU, SH

Lampiran 14. Notulensi Diskusi Panel: Perkebunan Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Arso, Jayapura, 5 Juli 2008.

LAPORAN PROSES

Diskusi Panel Perkebunan Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Arso 5 Juli 2008

I. Nama Kegiatan

Diskusi Panel Perkebunan Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Arso

II. Waktu Pertemuan

Sabtu, 5 Juli 2008.

Pukul 09.00 – 16.00 WIT.

III. Tempat Kegiatan

Gedung Kesenian Tanah Papua, Jayapura.

IV. Peserta Pertemuan

Undangan 100 orang. Namun, peserta membengkak sekitar 130 Orang (hitungan berdasarkan jatah makan siang yang habis terbagi). Daftar peserta dapat dilihat pada lampiran (tidak semua peserta menandatangani daftar hadir peserta)⁵⁹

V. Agenda Pertemuan

- Pemaparan makalah hasil penelitian Tim SKP Keuskupan Jayapura.
- Diskusi panel.

VI. Pertemuan

1. Pembukaan

Acara dimulai tepat pukul 10.00 WIT, atau molor lambat 1 jam dari waktu yang ditentukan dalam undangan. Sdri Oktavina Halitopo yang bertindak sebagai MC, mempersilahkan Frater Sandro OFM untuk memimpin doa pembukaan.

Selanjutnya acara secara resmi dibuka oleh badan pendiri SKP Keuskupan Jayapura, Pastor Ferdinand Sahadun OFM. Dalam sambutannya, pastor mengatakan hampir 25 tahun petani kelapa sawit Arso bergumul. Mari kita sebagai masyarakat, perlu memperbaiki mental. Mentalitas yang mau dicapai, yaitu mau melihat bumi Arso sebagai berkat dan kita dituntut untuk memberlakukan berkat itu secara benar dengan budi yang bijak dan tanggung jawab. Dengan demikian akan menjadi berkat bagi kita, bagi masyarakat Arso dan bagi bumi kita.

selanjutnya MC, mempersilahkan mederator yaitu Bapak Tomi Alan Wakum untuk memimpin jalannya diskusi. Namun sebelumnya MC membacakan biodata moderator.

⁵⁹ Daftar hadir peserta ditambahkan kemudian oleh Br. Edy Rosariyanto setelah Sdr. Boni berangkat ke Wamena.

Setelah moderator mengambil tempat, selanjutnya ia mempersilahkan para penyaji makalah untuk mengambil tempat. Ia juga membacakan biodata dari ketiga penyaji yaitu Pastor. John Jonga, Pr, Bruder Edy Rosaryanto OFM dan saudara Yohanes Rusmanta.

2. Presentasi:

- P. John Jonga Pr, mengantar presentase mereka dengan mengutarakan pengalaman dan refleksinya selama menyuarakan nasib petani Arso, khususnya warga pribumi. Beliau mengawali dengan menceritakan pengalamannya bertemu ibu Seravina Tuamis 18 tahun lalu, yang mengatakan: kami hidup bukan dari kelapa sawit, dan ketika hutan-hutan itu tidak ada maka kami akan mati. Pater memberi catatan :
 - Kehadiran kita semua disini bukan hanya untuk berdiskusi, tapi sebenarnya terdorong karena seberapa besar hak ulayat masyarakat adat Keerom telah habis. Kubur-kubur pun telah habis, di sini kita juga hadir bukan untuk saling mempersalahkan. Entah itu Pemerintah, masyarakat adat atau siapapun. Tetapi untuk mencari solusi agar masyarakat Arso tidak terus miskin. Barangkali agak terlambat, tapi kami punya Bupati (yang saat itu hadir) telah mulai mencari solusi sedikit demi sedikit.
 - Melalui diskusi ini mudah-mudahan kami dapat memberikan masukan-masukan yang berarti bagi anak cucu masyarakat asli Keerom ke depan. Kita akan mengkritisi perilaku pemerintah, pihak perkebunan, gereja dan kita sendiri sebagai masyarakat. Kita harus menjadi satu untuk membangun masyarakat Keerom ke depan.
- Bruder Edy Rosariyanto, OFM
Bruder Edy melanjutkan pengantar yang dibawakan oleh Pater Jhon, dengan mengulas latar belakang dari penelitian tersebut. Dalam latar belakang, Bruder Edy memaparkan :
 - Latar Belakang
 1. Permintaan dari Tim Pastoral Dekenat Keerom karena mereka melihat ada masalah di tingkat basis.
 2. Ada upaya masyarakat untuk mengangkat persoalan ini.
 3. Fakta di lapangan, masyarakat merasa bahwa sawit tidak memberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka.
 - Masalah :
 1. Apakah kesejahteraan masyarakat yang pernah dijanjikan oleh perusahaan sudah tercapai?
 2. Apakah dampak perkebunan kelapa sawit dalam aspek lingkungan ekonomi, sosial budaya, keamanan, hak ulayat bagi masyarakat asli Keerom?
 - Manfaat
 1. Membantu Dekenat Keerom dalam memahami umatnya,
 2. Membantu menyadarkan masyarakat akan pilihannya untuk menerima perkebunan sawit.
 3. Memberikan masukan kepada Pemda Keerom.
 - Pengumpulan Data:
 1. Wawancara langsung kepada masyarakat di Arso Kota, Kwimi, Wembi, Workwana, PIR 1, PIR 2, PIR 5, Arso XII dan Arso VII
 2. Refleksi sosial untuk melakukan kros cek data.

- Yohanes Rusmanta (pemateri ketiga), memaparkan BAB II dari makalah tersebut tentang gambaran umum. Beberapa catatan yang dipaparkan dalam bab II yaitu :

Fokus penelitian ini adalah pada distrik Arso, Skamto dan Arso Timur. Gambaran tentang mata pencaharian, bahasa, jumlah penduduk, batas wilayah juga dibahas pada BAB ini. PIR_trans adalah pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang dikaitkan dengan transmigrasi.

Dalam BAB II juga diuraikan hak dan kewajiban dalam program PIR_Trans :

Hak : Perusahaan berhak atas lahan perusahaan inti yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU), untuk jangka waktu 35 tahun. Waktu tersebut dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Petani berhak atas lahan rumah 0,5 Ha dan kebun plasma seluas 2 Ha. Lahan itu adalah lahan pekarangan, dan dapat diserahkan apabila telah siap diolah dan rumah selesai dibangun di atasnya.

Kewajiban :

- Perusahaan berkewajiban
 1. Membangun perkebunan inti lengkap dengan dengan pabrik ,
 2. Melaksanakan kebun plasma sesuai standar
 3. Pelaksana lahan pekarangan rumah petani
 4. Membeli seluruh budidaya hasil petani
- Petani PIR berkewajiban :
 1. Mengganti biaya pembangunan kebun plasma. Untuk itu petani peserta mendapat kredit lunak jangka panjang dari pemerintah.
 2. Mengusahakan kebun plasma sesuai dengan petunjuk teknis budi daya yang diberikan oleh perusahaan inti.
 3. Menjual seluruh kebun hasil plasma kepada perusahaan inti.

Jhon melanjutkan materi hingga bab III tentang dampak. Beliau memaparkan dampak perkebunan bagi masyarakat Arso yaitu:

- Dampak lingkungan (terjadi erosi, banjir, pencemaran udara), dan lain lain.
- Dampak ekonomi yang dilanjutkan oleh Bruder Edy mengatakan terjadi *shock ekonomi*, masyarakat asli diperkenalkan dengan pola pertanian dari yang sebelumnya sebagai peramu. Lebih lanjut, pendapatan bersih yang diterima petani adalah Rp 500.000,- /bln yang belum termasuk tenaga petani mengelola kelapa sawit.
- Dampak sosial budaya; seperti terjadi perubahan pola makan, perubahan mata pencaharian dari peramu ke petani modern, dll.
- Dampak Hak Ulayat; terjadi pelepasan tanah adat yang mengakibatkan masyarakat asli kehilangan hak ulayatnya.
- Dampak keamanan; masyarakat yang menolak atau berupaya untuk mengkritisi kondisi yang ada, selalu distigma sebagai suara yang menentang negara. Bahkan secara gamlang disebut OPM.

3. Diskusi Bagian I

Panel I

Setelah pemaparan makalah, selanjutnya tanggapan dari para panelis I yang terdiri dari Bupati Keerom dan Pokja Adat MRP bapak Maidepa. tanggapan

Bupati yaitu: Pertama para peneliti telah melihat sejarah masuknya kelapa sawit ini sudah tepat, kedua, sistematika sudah baik. Lalu yang ketiga adalah potret tentang efek yang terjadi. Pendekatan keamanan memang sangat tinggi, masyarakat seakan-akan tidak boleh bicara. Perlu juga penelitian ini memberikan saran yang kongkrit seperti apa yang dapat diberikan kepada pemerintah, gereja, perusahaan, rakyat.

Pokja Adat menanggapi

Kita berada pada zaman otsus dan berterima kasih kepada pihak penyelenggara khususnya SKP. Yang terpenting adalah membuat terobosan positif, mutlak berkomitmen untuk tidak menjadikan hasil seminar ini sebagai dokumen mati, tetapi harus ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua. Dan satu hal harus ditegaskan bahwa investasi untuk mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya moderator menyimpulkan tanggapan panel tadi dan dilanjutkan dengan diskusi panel II.

Panel II

Diskusi panel II ditanggapi oleh Pihak PTP II, Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Arso, Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) wilayah Keerom, perwakilan akademik dari UNIPA, dan Ketua DPR Keerom yang harusnya ada saat panel I, namun karena baru datang sehingga diberi kesempatan pada diskusi panel II.

- Pihak PTP II : selamat ulang tahun untuk SKP. Kami salut untuk penelitian dan tanggap positif. Namun PTPN II hadir di Papua atas inisiatif menteri. Tidak ada perusahaan yang berani, namun PTPN II berani hadir dan berhasil membuka keterisolasian daerah. Juga jangan lupa bahwa perputaran uang di Keerom sekarang sekitar 7 miliar perbulan
- Dewan Adat Papua (DAP) Arso: DAP berterima kasih pada SKP yang masih mau memperhatikan nasib mereka, DAP juga membeberkan kejadian masuknya perusahaan di Arso yang waktu itu dua kepala suku Maikel dan Demianus Worotian menyetujui adanya perusahaan dan transmigrasi. Walaupun mereka tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi kemudian. DAP minta agar perjanjian pelepasan tanah ulayat ditinjau ulang.
- PGGP Keerom (Pdt. Edy Togodly) : Yang saya lihat sebagai masalah adalah perlu ada pabrik (pabrik perlu berjalan), supaya setelah panen langsung diangkut ke pabrik. Pabrik perlu diperbaiki agar tidak terjadi antrian berhari-hari seperti selama ini. Sehingga Papua tidak hanya disebut Zona Damai, tetapi Zona Damai Sejahtera. Karena Papua memang damai namun masyarakat belum sejahtera.
- Penanggap dari Unipa; Menurutnya, berdasarkan referensi yang ada, produksitas kelapa sawit di Arso sangat rendah, jika dibandingkan dengan perkebunan-perkebunan di tempat lain. Tetapi sudah ditekankan bahwa pabrik perlu diperbaiki agar hasil-hasil para petani tidak ditumpuk-tumpuk, karena hal ini bisa membuat rusaknya kualitas dari kelapa sawit, yang tentunya akan menurunkan pendapatan petani.
- Ketua DPRD Kerom; beliau hanya tanggap apa yang dibacanya dari makalah dan menurutnya penelitian tersebut perlu dikembangkan lebih jauh, menyangkut hal positif dari aspek sosial budaya. Sawit pernah menjadi primadona, dimana pada saat masuknya itu, memang seperti yang telah diungkap peneliti bahwa ada aspek negatif, tetapi kita perlu melihat

ini sebagai suatu konsekuensi dari kemajuan. Hanya orang Arso yang bisa pegang uang juta-juta pada saat itu, dan saat ini. Kita perlu melihat aspek positifnya (perlu dilihat lebih utuh).

Usai tanggapan, moderator mempersilahkan panelis kembali ketempat masing-masing dan dilanjutkan dengan makan siang.
Makan siang tepat pukul 13.00 – 13.30 WIT

4. Diskusi Bagian II

Pada bagian II ini, seluruh panelis duduk menghadap peserta. Hal ini sengaja di atur oleh panitia agar diskusi lebih efektif dan memang berhasil. Selanjutnya yang menjadi moderator adalah Bapak Lindon Pangkali. Beliau mengarahkan diskusi agar semua pendapat hendaknya diutarakan dengan kepala dingin, pertanyaan yang terfokus. Untuk sekmen pertama moderator memberi kesempatan pada 5 penanya. Mereka yang bertanya yaitu: Yanuarius Doo, Damasus K. (Kepala Kampung PIR II), Tokoh Adat, Herlina Puhili, dan Ben Payafe. Mereka menyoroti masalah : terlantarnya hasil kelapa sawit petani yang tidak terakomodir untuk diolah oleh perusahaan. Perlu adanya perdasus untuk melindungi masyarakat asli. Perlu adanya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan semua kebijakan, terlebih yang bersentuhan langsung dengan kebiasaan hidup orang asli.

PTPN II menanggapi bahwa sekarang sedang diusahakan dan untuk itu sudah ada direktur yang terkait dengan upaya perbaikan tersebut. Boiler yang satu sedang diperbaiki. Jika sudah diperbaiki maka akan menampung 25 ton / jam. Ini berarti, tidak ada lagi hasil petani yang akan terlantar. Menyangkut perlindungan terhadap orang asli, MRP menjelaskan bahwa pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perdasus. Dan hal ini mestinya dijawab oleh DPR (namun Ketua DPR tidak ada di ruangan setelah makan siang). Selanjutnya Bupati mengatakan sedang melobi invertor lain agar dengan adanya persaingan antar perusahaan, pendapatan masyarakat dapat didongkrak. Ke depan, perlu ada koordinasi yang baik dengan semua elemen agar tidak ada yang merasa tidak dilibatkan.

Selanjutnya moderator membuka termen kedua. Walaupun jumlah penanya dibatasi, tapi peserta ngotot untuk tidak dibatasi, sehingga penanya mencapai 16 orang. Kebanyakan tanggapan peserta lebih emosional sehingga menjadi kurang jelas apa sebenarnya maksud dari hal yang dikomentarnya. Namun, pada intinya sama seperti pada sekmen pertama, hanya ada beberapa komentar yaitu : permintaan agar kurangi campur tangan pihak keamanan, meninjau ulang surat kontrak yang pernah dibuat dan mohon kepada SKP untuk terus mendampingi petani sawit di Keerom. Bupati menanggapi dengan menegaskan harus ada *follow up* dan sekarang yang harus kita lihat adalah bukannya saling mencari kesalahan. Lebih dari pada itu, perlu menatap ke depan untuk memperbaiki apa yang sedang terjadi. Menyangkut pengadaan pabrik baru, pihaknya sudah memberikan rekomendasi pada PTP II agar ditindaklanjuti. Setelah menjawab pertanyaan peserta, moderator menutup acara.

Selanjutnya MC mempersilahkan direktur SKP untuk menyerahkan cinderamata kepada panelis, moderator dan penyaji.
Pukul 16.00 WIT penyerahan tanda mata,

VII. Acara Penutup.

Direktur SKP membawakan sambutan penutup sekaligus menutup acara. Dalam sambutannya Beliau mengucapkan terima kasih pada semua hadirin terutama petani sawit dari kampung-kampung, Bapa-bapa penanggap, yg telah meluangkan waktu hingga sore ini. Diskusi itu merupakan upaya membangun kesadaran kritis.

Dari pembahasan tadi tampak ada kemunduran dan itu merupakan fakta di lapangan yaitu: manusianya mundur, karena dari data tadi jelas jumlah orang asli Arso berkurang. Kedua adalah mundurnya alam yang punya hubungan timbal balik dengan manusia. Ini menjadi tantangan bersama. Beliau juga mengucapkan terimakasih untuk tim peneliti, yang telah berusaha. Untuk selanjutnya, ia mengajak agar dapat dicari solusi yang baik. Kemudian Beliau menutup rangkaian kegiatan secara resmi.

Selanjutnya MC meminta ibu Herlina Wally untuk menutup acara dengan doa penutup.

VIII. Kesimpulan:

Pelaksanaan diskusi panel berhasil mempertemukan beberapa elemen penting yang berkompeten dengan perusahaan kelapa sawit di Arso. Dengan pertemuan itu, tiap intansi paham tentang kondisi masyarakat yang sedang dialami sekarang. Hasil panen kelapa sawit masyarakat tidak bisa dibeli perusahaan karena :

1. Daya tampung mesin di perusahaan tidak cukup untuk menampung semua hasil panen petani karena hanya ada satu mesin. Akibatnya perusahaan lebih memilih untuk menerima hasil panen PIR inti.
2. Kondisi jalan buruk dan biaya angkutan sangat mahal.
3. Banyaknya pungutan liar di perusahaan, baik oleh oknum staf perusahaan maupun oleh pihak keamanan.

Walaupun segala permasalahan yang ada berhasil didiskusikan bersama, namun tidak dirumuskan lebih jauh tentang rencana tindak lanjut. Walaupun Pemerintah dan Perusahaan telah menanggapi masalah di atas, tetapi tidak ada batasan waktu yang jelas tentang kapan semua akan normal kembali.

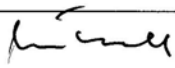
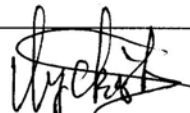
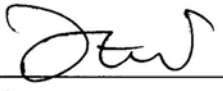
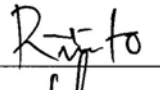
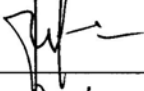
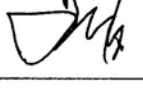
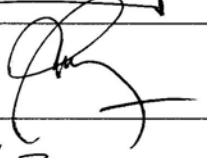
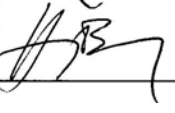
Saran-Saran :

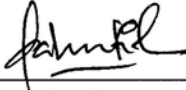
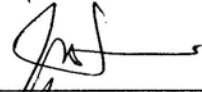
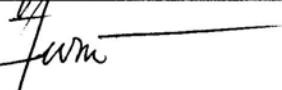
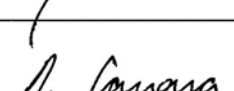
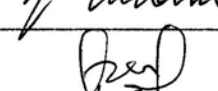
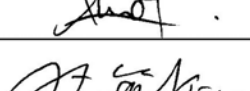
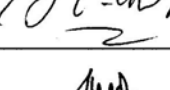
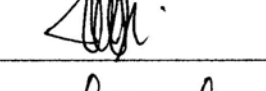
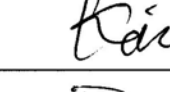
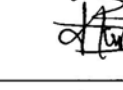
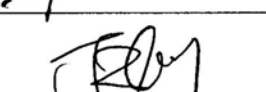
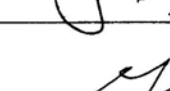
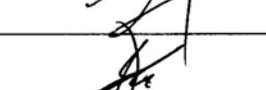
- SKP perlu terus memantau rencana tindak lanjut yang telah diutarakan oleh Perusahaan maupun Pemerintah Kabupaten Keerom.
- SKP dapat mejadi fasilitator untuk mengorganisir petani khususnya masyarakat Arso untuk mengorganisir diri dan melakukan berbagai aksi untuk memperbaiki kondisi di atas.

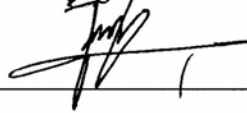
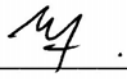
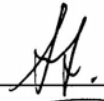
Rekaman proses disusun oleh

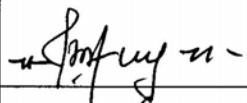
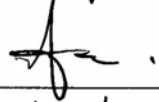
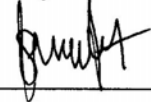
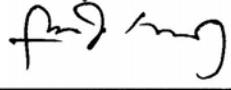
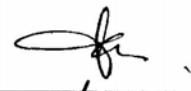
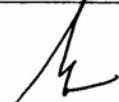
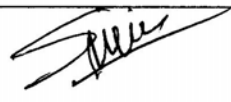
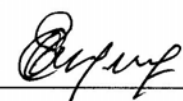
Bonny Alua, Fr. Toni Nuwa Wonga, ofm dan Herman

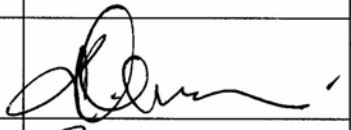
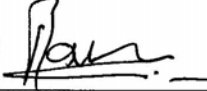
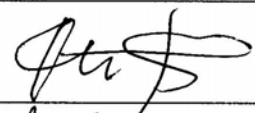
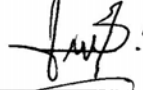
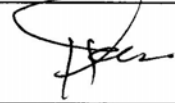
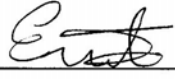
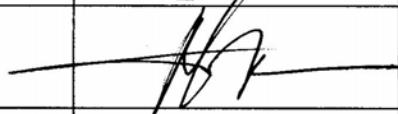
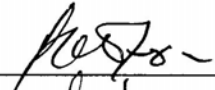
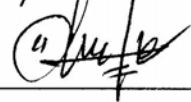
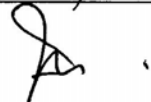
**DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PERKEBUNAN SAWIT DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT ARSO. Sabtu, 5 Juli 2008 di Gedung Kesenian Jayapura.**

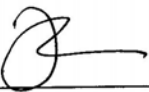
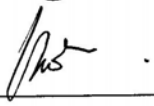
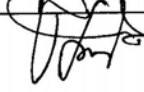
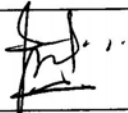
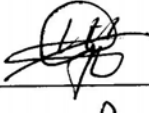
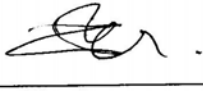
NO	NAMA	ASAL LEMBAGA	PARAF
1	Tommy A. Wabun	CII Program Ma-hewa Regu	
2	Yanuaris Duv.	STFT "FT"	
3	N.A. MAIDEPA	MIRP	
4	Johan Tanyo	Distrik Arso	
5	AURICA PAMU	Dizbunt kab. Kern.	
6	Johannis Tana	Toko Gereja	
7	HONK VAN MASTRIGT	Kel. ENTOM. PAPUA	
8	RINTO MAMBRASAR	KEL. ENTOM. PAPUA	
9	Seno Aji	Lembaga Perkem Perta nian Prov. Papua	
10	HUBERTUS. K	ARSO	
11	Y. S. BUDIVANTO	LENIPIA - POKW	
12	L. Y. Malan MM	PTP NTIAP	
13	PITER ROEL A	WWF	
14	HEWING BORCHERS	PBI	

NO.	NAMA	ASAL LEMBAGA	PARAF
15.	Rahmatika	TABLOID SUARA PEREMPUAN PAPUA	
16.	SUNARYO	kep - hampung	
17.	P. Ferdinand OFM	WARIBO APO	
18.	Lyndon Pangkajene	Free lance	
19.	Jane Canaran	PBI.	
20.	NURLINA.	SUARA PAPUA POS	
21.	TIARA	PAPUA EXPRESS	
22.	Ros	BISNIS PAPUA	
23.	Karel Lolo	WVI - Keerom	
24.	IDA URBINAS	ALDP	
25.	R. Sitompul	MTC. Sentani	
26.	B. Pasaribu	MTC Sentani	
27.	Laurens Matorbonga.	Sosokmas Beresapen	
28.	Jocel.	Kapeta. G.	
29.	DEMI-S	RR.I	
30.	Katharina L.	ramp. yamta	

NO.	NAMA	ASAL LEMBAGA	PARAF
31.	Damasus Kibeler	Ka. Kampup Yunta	
32.	VICTOR MAMBOR	Foker LSM PAPUA	
33.	F. S AGISOLO	LMA - Malumoi	
34.	Sandro Ranga	Nousist	
35.	Ben Koyzi	TOMAS Aquino	
36.	W. A. Kinyan	KEERUM	
37.	Richard. Tiert	Kurus Bir	
38.	ARTI	TEP-TV	
39.	Angel F	JUBI	
40.	Oket R	KPKC GK1	
41.	Paulus G.O.Ls	Uom. Karawau K3.	
42.	Rix TAURUji	RET. GAPPOTAN APD II	
43.	Frans MUSUY	Kamp. WEMBI	
44.	YOSER RINGA	Kamp. WEMBI	
45.	Barbara Iuamias	Perempuan ABEL AB	

NO.	NAMA	ASAL LEMBAGA	PARAF
46.	THGA Ranyuan	Gereja Katolik	
47.	My. MARIA Belauy	Q. Luthern Perempuan Jepi. G. K. T.	
48.	Hy. Yubelina A.	Perempuan.	
49.	FRANS ABR	AKO. KAMBES.	
50.	MAEDA PISONG	Gereja Katolik "Perempuan"	
51.	DRS CELSUS WATTE	Bup. Keerom	
52.	Sandy / wawan	TVMP	
53.	Septer	FOKER LSM	
54.	Ayub M.	KEEROM.	
55.	Lambertus y. Wally	Keerom	
56.	Pdt. EBY - I.	P66P. Keerom	
57.	Nico manong	KEEROM	
58.	ROTHIN CUCUP	ARSO	
59.	IBU Sumini	ARSO	
60.	CHRIS TAIGAT	ARSO KOTA	

NO	NAMA	ASAL LEMBAGA	PARAF
61.	Paulus Kyanre	ARSO	
62.	Paulinus KANDAM	ARSO.	
63.	Arnatus TOAM	ARSO	
64.	JHONATAN BATE	ARSO	
65.	HERLINA H.	ARSO.	
66.	EMILIANA TUGUIS	ARSO	
67.	Elly Wihewari	ARSO	
68.	OTEN KENDRA	ARSO	
69.	Abraham Dima	ARSO	
70.	Yulius - Fatagur	ARSO	
71.	Herman Fatagur	ARSO	
72.	Anton Nember	ARSO	
73.	Nasiriel Fatagur	ARSO	
74.	HERMAN-FATAGUR	ARSO	
75.	Hanzali Muin	PT. Papua Bangkit Mandiri Energi Jayapura	

NO	NAMA	ASAL LEMBAGA	PARAF
76.	Refikus F. Noma	Gerap Kat. Arso	
77	Ruetum. SH	Jawijer	
78.	Ryannir Anaguanin	Komp. W. Gorejo	
79	MISWAR	u YAMARA	
80.	Paskalis Keagap	TS P/P	
81.	YOSIAS. WAMBRAUW	TSP	
82.	Mudrikah.	BKMT KEEROM.	
83.	Mahyud	Repor	
84.	Dharma	The jakark Post	
85.	Moseh. watoru	CH - Papua	
86.	Dian Kandipi	Bintang Papua	
87.	Robi Edy	ELSHAM	
88.	Nikolas GiAi	ELSHAM	
89.	Dony M. Siktap	ELSHAM	
90.	Arki	Front Palera BB	

NO.	NAMA	ASAL LEMBAGA	PARAF
91.	PETRA S	CUKUN ANTANIA	(h)
92.	Antonius	Mangrove	Wag.
93.	MARGRET	GP3 PB	H
94.	Yulita Yemo	MAHASISWI (USTJ)	H
95.	ANGELINA GOGAI	USTJ (SASTRA INGGRIS)	Angelina
96.	LONGGINGS Fabela	KOTUK DPMA ARSO	Longgins
97.	Kundrat Gusbager	DPRD, kab. Keerom	
98.			
99.			
100.			
101.			
102.			
103.			
104.			
105.			